

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Kabupaten Probolinggo**

###### **a. Sejarah Kabupaten Probolinggo**

Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur, dengan ibukota dan pusat pemerintahan kabupaten di Kraksaan. Kabupaten Probolinggo juga merupakan salah satu kabupaten di wilayah Tapal Kuda Jawa Timur yang dikelilingi oleh tiga gunung yaitu Gunung Semeru, Gunung Argopuro, dan Pegunungan Tengger.. Daerah Kabupaten Probolinggo memiliki semboyan “Prasadja Ngsti Wibawa” yang artinya dengan tulus ikhlas untuk menuju kemuliaan.

Kabupaten Probolinggo pada saat pemerintahan Prabu Radjase Nagara (1350-1389), Probolinggo dikenal dengan sebutan Banger. Banger sendiri adalah nama sungai yang mengalir di tengah dukuh Banger yang kecil di Probolinggo dibawah pimpinan Akuwu. Nama Banger ternyata pertama kali diambil dari buku Negara Kertagama yang ditulis oleh Mpu Prapanca dari Kerajaan Majapahit. Dalam usahanya mendekati diri terhadap warga, Prabu Hayam Wuruk didampingi Patih Amangkubumi mengelilingi daerah-daerah sekitarnya antara lain, Lumajang serta Bondowoso. Tak terkecuali

juga desa Banger, di desa Banger Prabu Hayam Wuruk disambut dengan antusias warga yang bahagia, sehingga beliau meminta untuk memperluas wilayah Banger yang sekarang menjadi daerah Kabupaten Probolinggo pada 4 september 1359 Masehi. Perintah perluasan wilayah dengan hutan itulah yang menjadikan adanya nama Probolinggo. Banger mengalami perkembangan yang pesat seiring dengan perkembangan zaman. Hal tersebut menarik perhatian Bre Wirabumi (Minakjinggo) Raja Blambangan yang berkuasa, hingga akhirnya Banger dikuasai oleh Bre Wirabumi. Banger menjadi kancah perang saudara antara Bre Wirabumi (Blambangan) dengan Prabu Wikramardhana (Majapahit) yang dikenal dengan “Perang Paregreg”



Gambar 4.1 : Logo Kabupaten Probolinggo

#### **b. Letak Geografis Kabupaten Probolinggo**

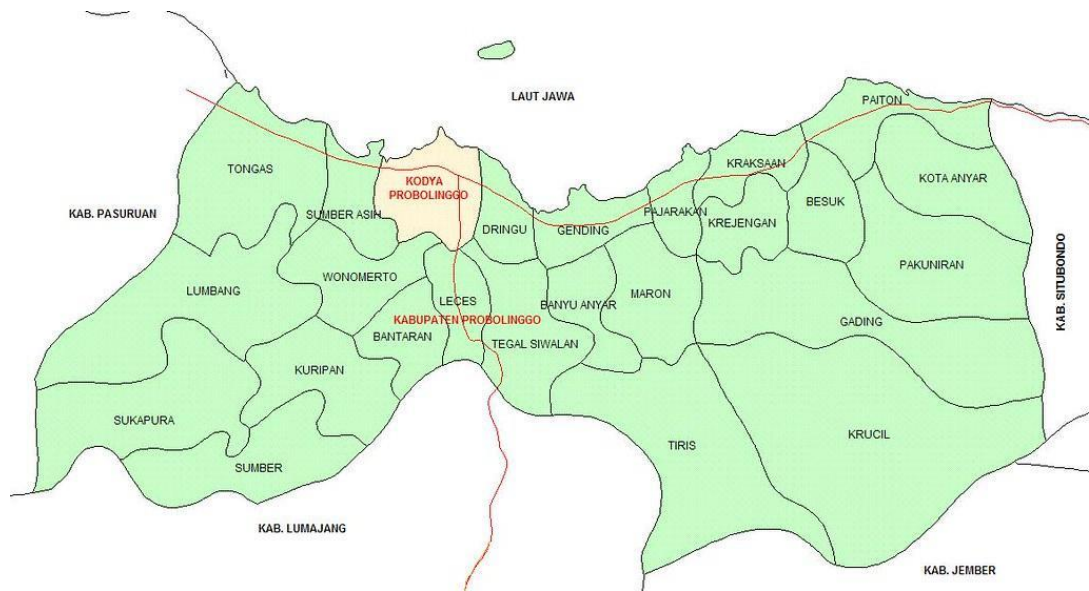
Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur berada pada posisi 112°50' – 113°30' Bujur Timur (BT) dan 7°40' – 8°10' Lintang Selatan (LS), dengan luas wilayah sekitar 169.616,65 Ha atau + 1.696,17 km<sup>2</sup> (1,07 % dari luas

daratan dan lautan Provinsi Jawa Timur). Dengan rincian sebagai berikut :

1. Permukiman : 147,74 Km<sup>2</sup>
2. Persawahan : 373,13 Km<sup>2</sup>
3. Tegal : 513,80 Km<sup>2</sup>
4. Perkebunan : 32,81 Km<sup>2</sup>
5. Hutan : 426,46 Km<sup>2</sup>
6. Tambak/Kolam : 13,99 Km<sup>2</sup>
7. Pulau Gili Ketapang : 0,60 Km<sup>2</sup>
8. Lain-lain : 188,24 Km<sup>2</sup>

Wilayah Kabupaten Probolinggo berbatasan dengan :

1. Sebelah Utara : Selat Madura
2. Sebelah Timur : Kabupaten Situbondo, Kabupaten Jember
3. Sebelah Barat : Kabupaten Pasuruan
4. Sebelah Selatan : Kabupaten Lumajang, Kabupaten Malang
5. Sebelah Utara bagian tengah terdapat Daerah Otonom yaitu  
Kota Probolinggo



Gambar 4.2 : Peta Administratif Kabupaten Probolinggo

Dilihat dari geografisnya Kabupaten Probolinggo terletak di lereng pegunungan yang membujur dari Barat ke Timur, yaitu Gunung Semeru, Argopuro, Lamongan dan Tengger. Selain itu terdapat gunung lainnya, yaitu Gunung Bromo, Widodaren, Gilap, Gambir, Jombang, Cemoro Lawang, Malang dan Batuujajar. Dilihat dari ketinggian berada pada 0-2500 m diatas permukaan laut dengan temperatur rata-rata 27°C – 30°C. Lokasi Kabupaten Probolinggo yang berada di sekitar garis khatulistiwa menyebabkan daerah ini mengalami perubahan iklim dua jenis setiap tahun, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Untuk musim kemarau berkisar pada bulan April hingga bulan Oktober dengan rata-rata curah hujan + 29,5 mm per hari hujan, sedangkan musim penghujan dari bulan Oktober hingga bulan April dengan rata-rata curah hujan + 229 mm per hari

hujan. Curah hujan yang cukup tinggi terjadi pada bulan Desember sampai dengan bulan Maret dengan rata-rata curah hujan + 360 mm per hari hujan. Diantara dua musim tersebut terdapat musim pancaroba yang biasanya ditandai dengan tiupan angin kering yang cukup kencang yang berhembus dari arah Tenggara ke Barat Laut biasa disebut “Angin Gending” Selain itu Kabupaten Probolinggo memiliki beberapa obyek wisata yaitu Gunung Bromo, Air Terjun Madakaripura, Pulau Gili Ketapang dengan taman lautnya, Pantai Bentar, Arum Jeram Sungai Pekalen, Ranu Segaran dan Sumber Air Panas serta Candi Jabung yang mencerminkan kejayaan masa lalu.

Adapun pembagian wilayah administratif, secara yuridis formal dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, yang terdiri dari 24 wilayah Kecamatan, 325 Desa dan 5 Kelurahan, 1.642 Rukun Warga (RW) dan 5.864 Rukun Tetangga (RT).

### **c. Visi Misi Kabupaten Probolinggo**

**Visi :** Terwujudnya Kabupaten Probolinggo Yang Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berwawasan Lingkungan dan Berakhlak Mulia.

## **Misi**

- a. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Daya Saing.
- b. Daerah, Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Kerakyatan, dan Optimalisasi.
- c. Pengelolaan Sumber Daya Yang Berkelanjutan.
- d. Mewujudkan Masyarakat Yang Berakhlak Mulia Melalui Peningkatan.
- e. Kualitas Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam Penyelenggaraan.
- f. Kepemerintahan Yang Baik dan Bersih.

## **2. Gambaran Umum Desa Randuputih**

### **a. Sejarah Desa Randuputih**

Desa Randuputih merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Asal mula Desa Randuputih berawal dari 2 Desa yaitu Desa Randulimo dan Desa Banyuputih. Desa Randulimo berada di sebelah barat yang dipimpin oleh kepala desa bernama Teken, sedangkan Desa Banyuputih berada di sebelah timur dengan kepala desa bernama Singo Rejo. Desa Randulimo terkenal dengan adanya Randu yang jumlahnya 5 ( Lima ) yang mana oleh warga nelayan dijadikan semacam mercusuar atau acuan diwaktu pulang dari melaut. Sedangkan Desa Banyuputih yang terkenal dengan sumber

airnya yang putih. Desa Randulimo dan Desa Banyuputih merupakan desa yang makmur, namun pada awal abad 19, saat itu ada sebuah penyakit yang meresahkan warga. Pagi sakit malam meninggal, malam sakit pagi meninggal begitu seterusnya, nama penyakit tersebut lebih dikenal dengan sebutan *Bakebluk*. Maka dengan adanya kejadian tersebut timbullah inisiatif dari kedua kepala desa untuk menggabungkan 2 desa tersebut menjadi 1 desa yaitu Desa Randuputih, dan menjadikan Singo Lesmono sebagai kepala desa ketika itu.

#### **b. Letak Geografis Desa Randuputih**

Desa Randuputih merupakan Desa yang terletak  $\pm$  2,5 km ke arah utara dari pusat Pemerintahan Kecamatan Dringu. Secara administratif batas-batas Desa Randuputih adalah sebagai berikut:

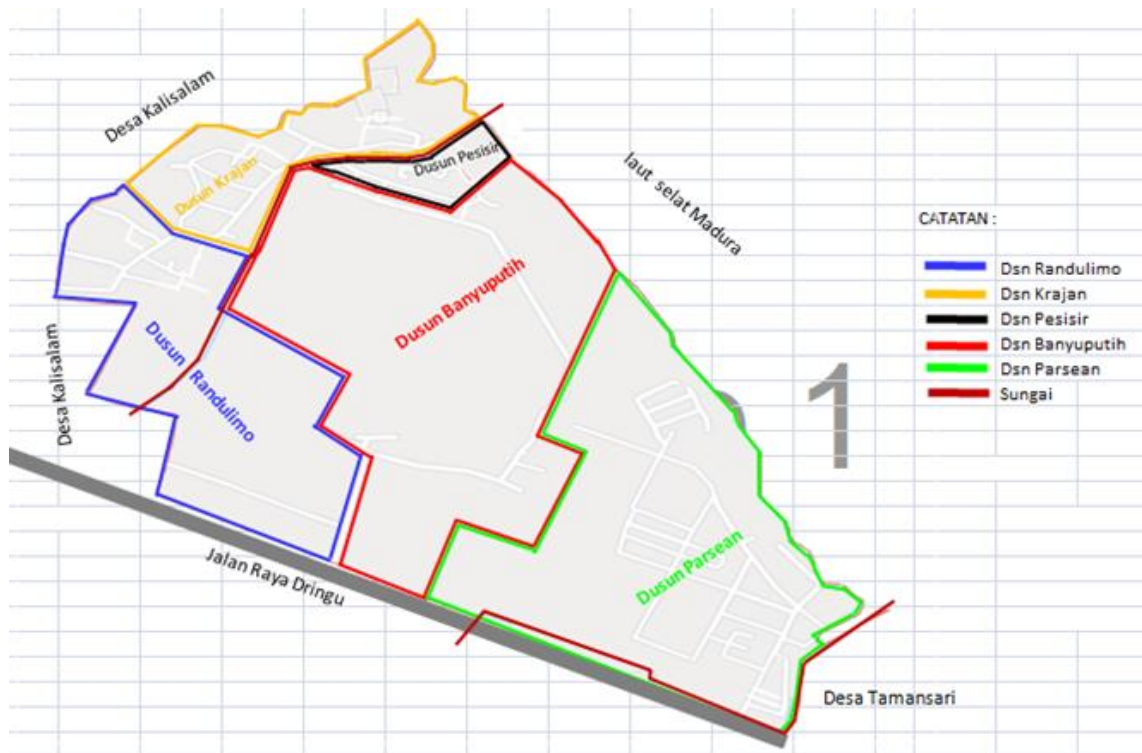
1. Sebelah Utara : Selat Madura
2. Sebelah Selatan : Desa Tamansari
3. Sebelah Barat : Desa Kalisalam
4. Sebelah Timur : Desa Tamansari

Desa Randuputih terdiri dari 5 Dusun, 5 RW (Rukun Warga) dan 13 RT (Rukun Tetangga) dengan rincian sebagai berikut :

1. Dusun Randulimo : RT 01, 02, 03
2. Dusun Krajan : RT 04, 05, 06
3. Dusun Pesisir : RT 07, 08

4. Dusun Banyuputih : RT 09, 10, 11

5. Dusun Parsean : RT 12, 13



Gambar 4.3 : Peta Desa Randuputih

### c. Visi Misi Desa Randuputih

#### Visi

"Mewujudkan Desa Randuputih menjadi Desa Perekonomian yang mandiri melalui ekonomi kreatif"

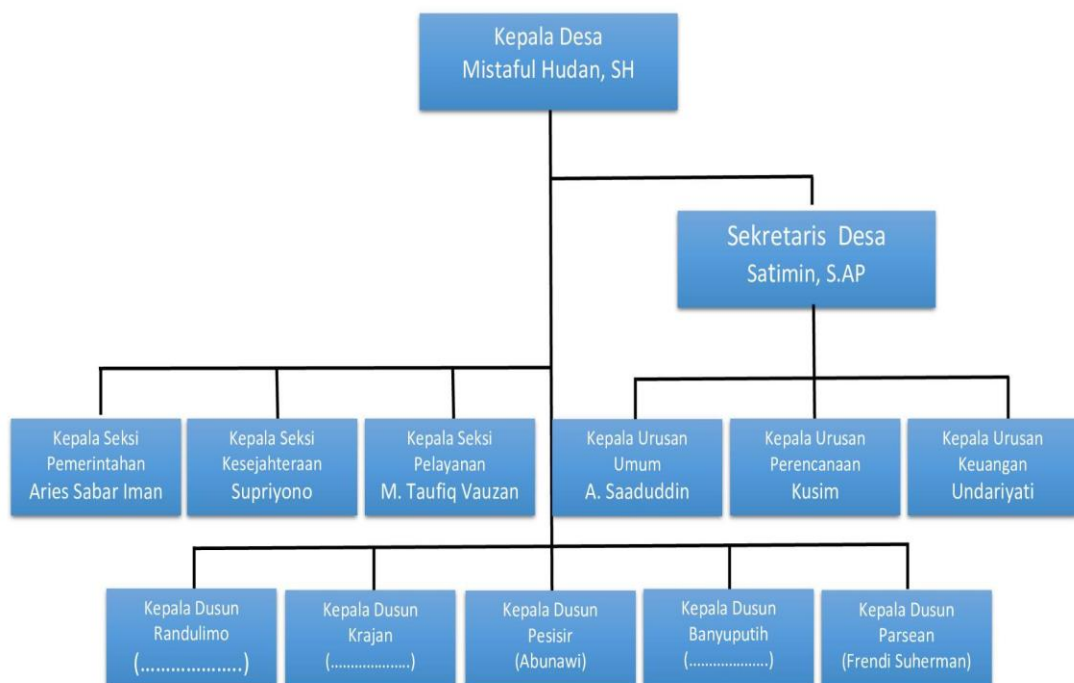
#### Misi

1. Melakukan reformasi kinerja pekerja desa terhadap pelayanan masyarakat
2. Melaksanakan pemerintahan yang bersih



3. Melaksanakan pemerintahan sesuai dengan undang-undang
4. Meningkatkan perekonomian masyarakat terutama nelayan, pertanian, dan UMKM

#### d. Struktur Organisasi Pemerintah Desa



Gambar 4.4 : Struktur Organisasi Pemerintah Desa Randuputih

#### e. Sumber Daya Desa Randuputih

- Sumber Daya Alam

Tabel 4.1

Sumber Daya Alam Desa Randuputih

No	Uraian Sumber Daya Alam	Jumlah	Satuan
1	Lahan Persawahan	76	Hektar
2	Lahan Kering	59	Hektar
3	Sungai	1	

No	Uraian Sumber Daya Alam	Jumlah	Satuan
4	Tanaman Pertanian : padi, jagung, bawang, Lombok dan tanaman buah	76	Hektar

Sumber : Pemerintah Desa Randuputih

#### • Sumber Daya Manusia

Jumlah penduduk Desa Randuputih sebanyak 3.856 jiwa yang terdiri dari 1.945 penduduk laki-laki dan 1.911 penduduk perempuan. Mayoritas penduduknya beragama islam, tetapi terdapat penduduk yang beragama kristen dan katolik. Penduduk Desa Randuputih bersuku jawa, namun bahasa sehari-hari yang digunakan penduduknya mayoritas bahasa madura. Sumber penghasilan utama penduduk Desa Randuputih yaitu pertanian, nelayan, buruh pabrik, pegawai dan wirausaha.

Daftar sumber daya manusia Desa Randuputih meliputi sebagai berikut :

**Tabel 4.2**  
**Sumber Daya Manusia Desa Randuputih**

No	Uraian Sumber Daya Manusia	Jumlah		Satuan
		L	P	
1	Penduduk dan Keluarga			
	a. Jumlah penduduk	1.945	1.911	Orang
	b. Jumlah keluarga	1.131	108	Keluarga

No	Uraian Sumber Daya Manusia	Jumlah		Satuan
		L	P	
2	Sumber Penghasilan Utama Penduduk			
	a. Pertanian, perikanan, perkebunan	548	117	Orang
	b. Industri pengolahan (pabrik, kerajinan, dll)	21	55	Orang
	c. Perdagangan besar/eceran dan rumah makan	10	15	Orang
	d. Angkutan, perdgudangan, komunikasi	15	0	Orang
	e. Jasa (Tukang cukur, salon, tukang batu, bidan, dokter, guru, pegawai)	27	24	Orang
	f. Lainnya (air, gas, listrik, konstruksi, perbankan, dll)	5	3	Orang
3	Tenaga Kerja Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan			
	a. Lulusan S-3 keatas	0	0	Orang
	b. Lulusan S-2 keatas	4	3	Orang
	c. Lulusan S-1 keatas	24	21	Orang
	d. Lulusan SMA	153	165	Orang
	e. Lulusan SMP	125	121	Orang
	f. Lulusan SD	435	304	Orang

No	Uraian Sumber Daya Manusia	Jumlah		Satuan
		L	P	
	g. Tidak tamat SD/tidak sekolah	100	125	Orang
4	Data Kemiskinan			
	a. Jumlah KK Non Miskin	653	57	Keluarga
	b. Jumlah KK Miskin	360	61	Keluarga
5	Cacat Mental dan Fisik			
	a. Cacat Fisik			
	1) Tuna Rungu	0	0	Orang
	2) Tuna Wicara	0	0	Orang
	b. Cacat Mental			
	1) Idiot	0	0	Orang
	2) Gila	0	0	Orang
	3) Stress	0	0	Orang
6	Jumlah Tenaga Kerja Usia Produktif	552	305	Orang

Sumber : Pemerintah Desa Randuputih

### **3. Gambaran Umum Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo**

#### **a. Sejarah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo**

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan salah satu dinas teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo yang mempunyai tugas pokok urusan Pemerintahan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 64 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan kabupaten probolinggo.

Dinas ini secara efektif melaksanakan tugas pokok dimaksud sejak Tanggal 1 Januari 2017 sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo nomor 6 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah di Kabupaten Probolinggo, sehingga fungsi-fungsi yang dilaksanakan selain merumuskan, melaksanakan kebijakan teknis dan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan serta pelaksanaan administrasi dan UPT pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Arah Pembangunan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelaksanaan dan bantuan teknis pembangunan bangunan gedung daerah.
2. Peningkatan penyediaan prasarana air bersih.
3. Peningkatan kualitas lingkungan utamanya pada kawasan-kawasan terbangun.
4. Peningkatan kebutuhan sarana sanitasi bagi warga masyarakat sehingga tercipta lingkungan hunian yang aman, tertib, sehat, Nyaman dan Lestari.
5. Meningkatkan pengembangan pembangunan perumahan.

**b. Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo**

1. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
2. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai fungsi :
  - perumusan kebijakan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
  - pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
  - pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan,

kawasan permukiman dan pertanahan;

- pelaksanaan administrasi di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- pembinaan terhadap UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

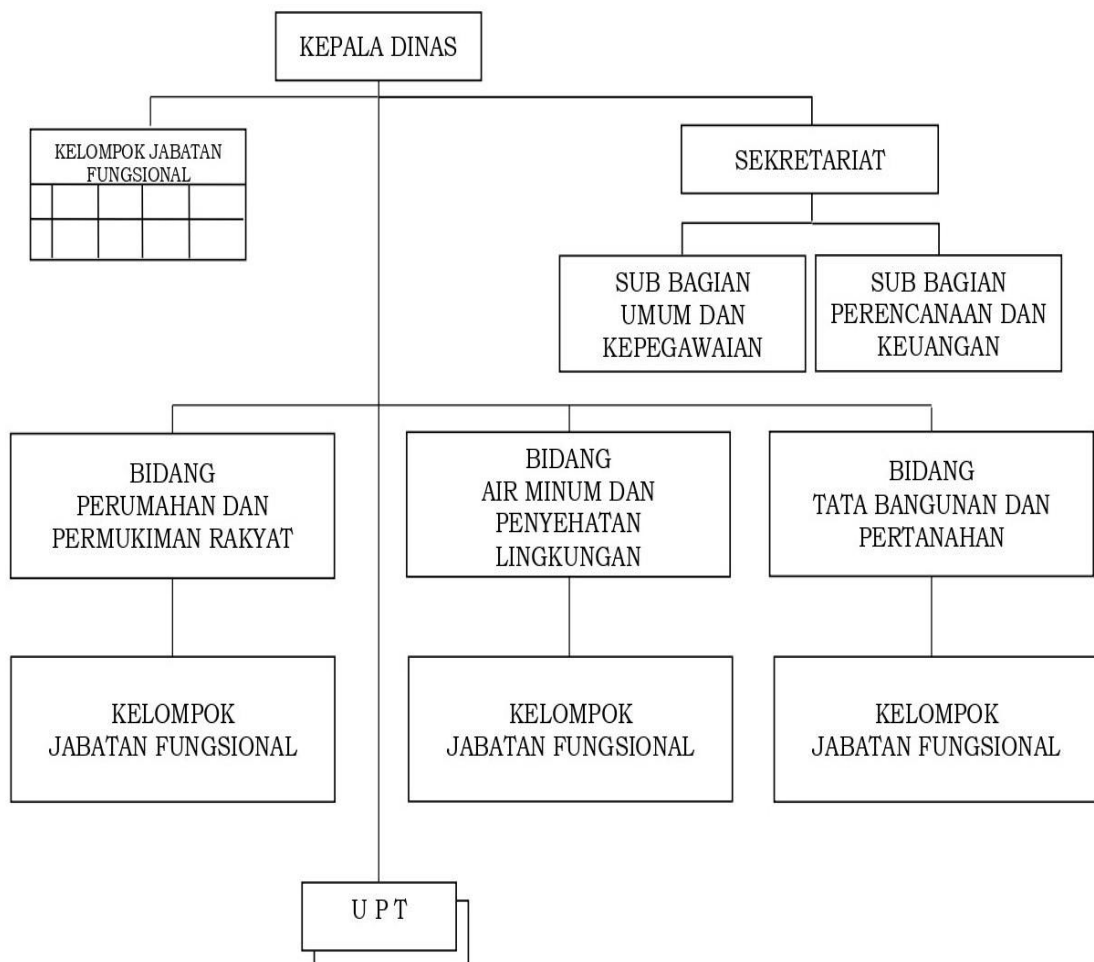
**c. Visi Misi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo**

**Visi** : Terwujudnya Prasarana dan Sarana Infrastruktur Perumahan, Kawasan Permukiman dan Bangunan Yang Berwawasan Lingkungan.

**Misi**

1. Meningkatkan Pembangunan Daerah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sehingga tercipta lingkungan yang Aman, Tertib, Sehat, Nyaman dan Lestari.
2. Meningkatkan pembangunan gedung daerah dan ketersediaan lahan pembangunan melalui tertib administrasi pertanahan

**d. Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo**



**Gambar 4.5 : Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo**



## **B. Penyajian Data Fokus Penelitian**

Pelaksanaan wawancara dengan informan di lokasi penelitian yang dilakukan dengan wawancara secara langsung. Informan yang diwawancarai meliputi Kepala Seksi Penanganan Air Limbah Domestik Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo, Sekretaris Desa Randuputih dan masyarakat penerima bantuan program DAK Sanitasi. Dalam wawancara tersebut mengenai Implementasi Program Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi (DAK Sanitasi) di Desa Randuputih, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo yang akan disajikan dengan teknik kualitatif deskriptif dengan tetap mengacu pada interpretasi data. Dalam hal ini terdapat variabel, dan beberapa indikator yang digunakan untuk melakukan penelitian.

### **1. Implementasi Program Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi (DAK Sanitasi) di Desa Randuputih, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo**

Implementasi kebijakan menjadi salah satu tahapan yang sangat penting dalam proses kebijakan publik. Implementasi kebijakan menjadi tahapan yang nantinya menentukan sebuah kebijakan apakah mencapai tujuannya atau mengalami kegagalan. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan proses Implementasi Program Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi (DAK Sanitasi) di Desa Randuputih, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo. Teori yang digunakan dalam menganalisis

penelitian ini yaitu model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975). Van Meter dan Van Horn mengatakan proses implementasi merupakan performa dari sebuah pelaksanaan suatu kebijakan yang secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang berlangsung dalam hubungan dengan berbagai variabel.

Adapun menurut Van Meter dan Van Horn terdapat enam variabel yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, sikap atau kecenderungan (disposisi) pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Keenam variabel ini akan dijelaskan pada sub bab sebagai berikut:

### **1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan**

Ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan berguna untuk menjelaskan keseluruhan tujuan dari keputusan kebijakan. Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur keberhasilannya apabila ukuran dan tujuan kebijakan tersebut sesuai dengan sosio-kultur yang ada di tempat pelaksanaan.

Dalam hal ini ukuran dan tujuan kebijakan memiliki beberapa indikator yang berdampak pada Implementasi Program Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi (DAK Sanitasi) di Desa Randuputih, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo diantaranya :

### a. Ukuran Kebijakan

Dalam implementasi kebijakan haruslah sesuai dengan ukuran dan isi yang telah tertuang di dalam dokumen kebijakan. Oleh sebab itu, suatu kebijakan harus memiliki ukuran dan isi yang tegas dan jelas. Jika suatu kebijakan memiliki ukuran dan isi yang jelas, maka tidak akan menimbulkan multi interpretasi antar implementor ataupun kelompok sasaran. Ukuran kebijakan implementasi program DAK Sanitasi di Desa Randuputih berpacu pada peraturan skala nasional yang dikeluarkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.

Data dari hasil penelitian ini didapat melalui wawancara dengan Bapak Satimin selaku Sekretaris Desa Randuputih. Hasil wawancara dengan Bapak Satimin, beliau mengatakan:

*“Program sanitasi itu program skala nasional. Program sanitasi itu memang pemerintah desa mengusulkan kepada dinas terkait karena Desa Randuputih itu sangat membutuhkan, dalam artian untuk mencapai ODF ketika itu Desa Randuputih masih 65% dengan tambahan dari program tersebut sekarang sudah 78% mengenai sanitasi di Desa Randuputih termasuk jamban sehat tersebut. Untuk juklak dan pelaksanaan teknik program DAK Sanitasi ini kami berdasarkan hasil rapat bersama dengan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo” (Wawancara dengan Bapak Satimin selaku Sekretaris Desa Randuputih pada hari Senin 26 Juni 2023, pukul 09.00 WIB di Kantor Desa Randuputih)*

Pernyataan tersebut diperjelas oleh Ibu Nur Khamidah Maulidiah selaku Kepala Seksi Penanganan Air Limbah Domestik

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo, beliau mengatakan:

“Program DAK merupakan program nasional yang sumber dananya dari pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam rangka membantu ketersediaan bangunan sanitasi, diantaranya berupa pembangunan jamban sehat, kamar mandi dan juga pengelolaan persampahan. Untuk ukuran atau pedoman pelaksanaan program, kami mengikuti peraturan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat” (*Wawancara dengan Ibu Nur Khamidah Maulidiah selaku Kepala Seksi Penanganan Air Limbah Domestik pada hari Senin 26 Juni 2023, pukul 10.00 WIB di Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo*)

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa program DAK Sanitasi yakni program nasional dengan sumber dana dari pemerintah pusat yang dialokasikan kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk membantu tersedianya bangunan sanitasi. Ukuran kebijakan pelaksanaan program DAK Sanitasi mengikuti peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dan hasil rapat bersama dengan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo.

Hasil observasi yang dilakukan peneliti menjelaskan ukuran kebijakan dari program DAK Sanitasi mengikuti peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Hal tersebut dibuktikan oleh adanya *e-book* yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang berjudul *Petunjuk*

Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Bidang Sanitasi Tahun 2022. Dalam *e-book* tersebut dijelaskan mengenai ketentuan umum, proses pelaksanaan, dan ketentuan teknis dari pelaksanaan DAK infrastruktur bidang sanitasi.



Gambar 4.6 *e-book* Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan DAK Infrastruktur Bidang Sanitasi TA. 2022

#### **b. Tujuan Kebijakan**

Tujuan kebijakan merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan. Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika tujuan kebijakan memang realistis dengan sosio kultural yang ada

di tingkat pelaksanaan. Tujuan kebijakan dalam implementasi program DAK Sanitasi yaitu untuk meningkatkan akses sanitasi layak di masyarakat.

Data dari hasil penelitian ini didapat melalui wawancara dengan Bapak Satimin selaku Sekteratis Desa Randuputih. Hasil wawancara dengan Bapak Satimin, beliau mengatakan:

“Yang namanya program kalau mau 100% berhasil tidaklah mungkin pasti ada kendala-kendala. Menurut hasil monitoring dan evaluasi dari dinas terkait terakhir itu bahwa 67 titik pembangunan jamban sehat sudah didatangi, diperiksa secara bergantian, Desa Randuputih masuk kategori baik, baik secara fisik maupun secara administrasi itu tepat waktu. Kalau di masyarakat masih merasa kurang, ya memang kurang tapi pemerintah Desa Randuputih berupaya agar Randuputih itu 100% ODF, warganya mempunyai jamban sehat. Saat ini Randuputih ada diangka 78% sanitasi layak” (*Wawancara dengan Bapak Satimin selaku Sekretaris Desa Randuputih pada hari Senin 26 Juni 2023, pukul 09.00 WIB di Kantor Desa Randuputih*)

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Nur Khamidah Maulidiah selaku Kepala Seksi Penanganan Air Limbah Domestik Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo. Dari hasil wawancara dari Ibu Nur Khamidah Maulidiah mengatakan:

“Tujuan dari program DAK itu kan ada target SDGS 2030 akses sanitasi layak harus 100%, kasus BABS turun menjadi 0%. Sedangkan untuk wilayah Kabupaten Probolinggo sendiri akses sanitasinya masih 62%, masih kurang sekitar 38% dengan begitu wilayah Kabupaten Probolinggo disupport oleh pemerintah pusat dengan bantuan DAK ini” (*Wawancara dengan Ibu Nur Khamidah Maulidiah selaku Kepala Seksi Penanganan Air Limbah Domestik pada hari Senin 26 Juni*

*2023, pukul 10.00 WIB di Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo)*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa program DAK Sanitasi yang bertujuan untuk mencapai target *Sustainable Development Programs (SGDs) 2030* untuk akses sanitasi layak mencapai 100% dengan kasus buang air besar sembarangan menjadi 0%. Dalam Implementasi Program DAK Sanitasi di Desa Randuputih tujuan tersebut belum sepenuhnya tercapai, akses sanitasi layak di Desa Randuputih masih diangka 78%. Meskipun capaiannya tinggi, namun masih ada masyarakat yang belum merasakan manfaat program pembangunan jamban sebagai implementasi program DAK Sanitasi di Desa Randuputih.

Hasil observasi yang dilakukan peneliti menjelaskan bahwa tujuan program DAK Sanitasi di Desa Randuputih berupa pembangunan jamban bagi masyarakat belum sepenuhnya tercapai. Hal ini didapati masih banyak warga yang belum merasakan manfaat dari program sanitasi ini. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya data jamban Desa Randuputih.

**Tabel 4.3**  
**Data Jamban Desa Randuputih**

<b>No</b>	<b>Dusun</b>	<b>Data KK Desa</b>	<b>KK Yang Berjamban</b>	<b>KK Yang Belum Berjamban</b>	<b>%</b>
1	Randulimo	277	271	6	97,83393502
2	Krajan	359	341	18	94,98607242
3	Pesisir	216	216	53	75,46296296
4	Banyuputih	240	240	50	79,16666667
5	Parsean	257	257	119	53,69649805
Total		1349	1103	246	81,76426983

Dalam tabel tersebut menjelaskan bahwa masih banyak warga Desa Randuputih yang belum memiliki jamban, meskipun program DAK Sanitasi sudah dilaksanakan sejak tahun 2020 hingga 2022. Dusun Randulimo menjadi wilayah yang paling sedikit warganya yang belum memiliki jamban. Perbedaan paling mencolok terjadi di Dusun Parsean, sebanyak 199 KK belum memiliki jamban. Hal tersebut disebabkan ketidakterediaan lahan untuk pembangunan jamban dan tangki septik individual yang dikarenakan jarak antar rumah warga yang berdekatan.

### **c. Sasaran Kebijakan**

Sebuah kebijakan harus memiliki sasaran kebijakan yang jelas dan dapat diukur sehingga dapat direalisasi. Jika sasaran kebijakan tidak jelas, akan ada banyak interpretasi yang berbeda dan mudah menimbulkan konflik di antara agen implementasi. Sasaran kebijakan dari program DAK Sanitasi mengacu pada peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.

Data dari hasil penelitian ini didapat melalui wawancara dengan Bapak Satimin selaku Sekteratis Desa Randuputih. Hasil wawancara dengan Bapak Satimin, beliau mengatakan:

“Sasaran dari program sanitasi ini pemerintah Desa Randuputih memprioritaskan warga miskin terlebih dahulu. Apabila warga miskin sudah memiliki jamban, lalu melangkah ke warga kelas menengah” (*Wawancara dengan Bapak*



*Satimin selaku Sekretaris Desa Randuputih pada hari Senin 26 Juni 2023, pukul 09.00 WIB di Kantor Desa Randuputih)*

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Nur Khamidah Maulidiah selaku Kepala Seksi Penanganan Air Limbah Domestik Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo. Dari hasil wawancara dari Ibu Nur Khamidah Maulidiah mengatakan:

*“Mengikuti aturan yang ada, sasaran dari program DAK Sanitasi ini yang pertama yaitu masyarakat yang tidak memiliki jamban, kedua masyarakat miskin, kemudian masyarakat yang beresiko stunting” (Wawancara dengan Ibu Nur Khamidah Maulidiah selaku Kepala Seksi Penanganan Air Limbah Domestik pada hari Senin 26 Juni 2023, pukul 10.00 WIB di Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo)*

Berdasarkan hasil wawancara diatas disimpulkan bahwa sasaran dari program DAK Sanitasi berpedoman pada aturan skala nasional yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu warga yang tidak mempunyai jamban, warga miskin dan warga beresiko stunting.

Sementara hasil observasi yang dilakukan peneliti menjelaskan bahwa sasaran kebijakan dari pembangunan jamban sebagai implementasi program DAK Sanitasi di Desa Randuputih yaitu warga miskin dengan penghasilan dibawah 1 juta. Hal tersebut dibuktikan oleh data penerima manfaat program.

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO  
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN  
PERTANAHAN  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
Jl. Raya Dringu No. 81 Telp./Fax. (0335) 433631  
PROBOLINGGO 67271

---

DAFTAR PENERIMA MANFAAT

Lokasi Dusun Randulimo

No	Nama Kepala Keluarga	Jumlah Anggota Keluarga	KK	Pekerjaan	Rata-rata Penghasilan/Bulan	Alamat
1	Agus	4	1	Nelayan	900.000	Randulimo Rt.01/01
2	Mentik	3	1	Menjahit	850.000	Randulimo Rt.01/01
3	Mening Rusiati	4	1	Ibu RT	650.000	Randulimo Rt.01/01
4	Syarif	5	1	Kuli	850.000	Randulimo Rt.01/01
5	Robiyanto	3	1	Kuli	750.000	Randulimo Rt.02/01
6	Misri	3	2	IbuRT	500.000	Randulimo Rt.02/01
7	Sutarji	3	1	Kuli	750.000	Randulimo Rt.02/01
8	Mujiono	6	2	Kuli	650.000	Randulimo Rt.02/01
9	Sayani	1	1	IbuRT	500.000	Randulimo Rt.02/01
10	Sjamsul Bahri	7	2	Kuli	800.000	Randulimo Rt.02/01
11	Sumarno	5	1	Kuli	850.000	Randulimo Rt.03/01
12	Buamar	6	2	Tani	750.000	Randulimo Rt.03/01
13	Teguh Santoso	5	1	Supir	850.000	Randulimo Rt.03/01
14	Rohman Holip	4	1	Kuli	750.000	Randulimo Rt.03/01
Total		59	18			

Gambar 4.7 Data Penerima Manfaat

## 2. Sumber Daya

Sumberdaya menjadi hal yang penting dalam implementasi sebuah kebijakan. Keberhasilan dari implementasi kebijakan bergantung kepada sejauh mana ketersediaan sumberdaya mampu mengalokasi standar dan sasaran kebijakan. Dalam hal ini sumber daya beberapa indikator yang berdampak pada Implementasi Program Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi (DAK Sanitasi) di Desa Randuputih, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo antara lain sebagai berikut:

### a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia menjadi faktor yang sangat penting dalam mencapai tujuan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan, harus didukung oleh sumber daya manusia yang memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Akan tetapi apabila kualifikasi dan keterampilan sumber daya tersebut nihil, maka dalam hal ini kinerja kebijakan sulit untuk diharapkan.

Sumber daya manusia yang terlibat dalam pembangunan jamban dalam implementasi program DAK Sanitasi sebanyak 11 pekerja.

Data dari hasil penelitian ini didapat melalui wawancara dengan Bapak Satimin selaku Sekteratis Desa Randuputih. Hasil wawancara dengan Bapak Satimin, beliau mengatakan:

“Pekerja untuk pembangunan jamban itu sebanyak 11 orang. Satu titik bangunan itu 5 sampai 6 orang. Untuk kualitas pekerjaanya itu standar” (*Wawancara dengan Bapak Satimin selaku Sekretaris Desa Randuputih pada hari Kamis 3 Agustus 2023, pukul 09.00 WIB di Kantor Desa Randuputih*)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia dalam implementasi program DAK Sanitasi secara kuantitas sebanyak 11 orang dengan kualitas pekerja yang sudah sesuai.



program DAK Sanitasi di Desa Randuputih berasal dari pemerintah pusat.

Data dari hasil penelitian ini didapat melalui wawancara dengan Ibu Nur Khamidah Maulidiah selaku Kepala Seksi Penanganan Air Limbah Domestik Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo. Hasil wawancara dari Ibu Nur Khamidah Maulidiah, beliau mengatakan:

“Disetiap tahunnya sumber daya finansial dalam kegiatan ini cukup. Untuk sumber dananya itu murni dari pusat, dari dinas tidak mengeluarkan dana apapun. *(Wawancara dengan Ibu Nur Khamidah Maulidiah selaku Kepala Seksi Penanganan Air Limbah Domestik pada hari Senin 26 Juni 2023, pukul 10.00 WIB di Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo)*

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Satimin selaku Sekretaris Desa Randuputih. Dari hasil wawancara Bapak Satimin, beliau mengatakan:

“Program DAK tahun 2022 ini desa menerima dana sebesar 450 juta. Dana itu murni dari dana BOK Kabupaten yang diberi oleh pemerintah pusat. Pemerintah desa hanya memfasilitasi terkait dengan tempat rapat atau yang lain-lain. Dana swadaya ada karena inisiatif dari masyarakat seperti memberi makan kepada tukang, hanya sebatas itu. Untuk materi yang lain warga tidak dilibatkan terkait dengan finansialnya” *(Wawancara dengan Bapak Satimin selaku Sekretaris Desa Randuputih pada hari Kamis 3 Agustus 2023, pukul 09.00 WIB di Kantor Desa Randuputih)*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sumber daya finansial dalam pembangunan jamban bagi masyarakat di Desa Randiputih sebagai implementasi program DAK Sanitasi berasal dari pemerintah pusat. Dana yang diterima pemerintah Desa Randuputih cukup besar. Dalam proses pembangunan berlangsung, masyarakat tidak dilibatkan untuk mengeluarkan biaya pembangunan. Adanya dana swadaya karena inisiatif dari masyarakat sendiri yang dikeluarkan untuk memberi konsumsi kepada pekerja selama proses pembangun jamban.


Sementara hasil observasi yang dilakukan peneliti menjelaskan dana yang di terima pemerintah Desa Randuputih untuk pembangunan jamban bagi masyarakat cukup besar. Alokasi dana yang diterima desa digunakan untuk pembiayaan tenaga pekerja, pembelian bahan material dan biaya operasional lainnya. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya Rencana Penggunaan Dana (RPD) Program DAK Sanitasi 2022.

**RENCANA PENGGUNAAN DANA (RPD)**  
RPD TOTAL (100%)  
PROGRAM DAK SANITASI 2022


Desa : Randuputih  
Kecamatan : Probolingo

No	Rincian Penggunaan Rencana Kerja/ Barang/Jasa/Adm	Kebutuhan Total	Kual. &/d Tabung Lata	Volume		Unit/ Satuan	Harga Rp	Jumlah Biaya Rp
				Penggunaan Sebelum (25%)	Jumlah Konsertat			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4) x (5)	(7)	(8)	(9)=(7) x (8)
<b>I. TENAGA KERJA</b>								
1	Pekerja	1025						
2	Tukang	502						
<b>II. BAHAN/MATERIAL</b>								
1	Batu merah	50400						
2	Bendrat	41						
3	Besi beton Ø 8 mm	820						
4	Besi beton Ø 80 cm	134						
5	Urak	270						
6	Kayu 4/6	208						
7	Kawat longkrok	67						
8	Koral beton	50						
9	Posir urug	26						
10	Passir pasang	90						
11	Passir beton	50						
12	Semen/PC (40 kg)	850						
13	Paku	71						
14	Cal Dinding	97						
15	Plamir Dinding	48						
16	Plywood	55						
17	Pipa PVC Air Limbah SNI MOF Ø 4"	52						
18	Knae Ø 4"	67						
19	Pipa GI Medium Ø 1"	10						
20	Pipa T 4"	134						
21	Roster Rata	134						
22	Pintu Standart	67						
23	Kawat-kawat 5 x 7 cm	138						
24	Semp Galvalum	30						
<b>III. BIAYA OPERASIONAL</b>								
1	Biaya Operasional (Atk, Banner, Kapat Dll)	1						
2	Papan nama kegiatan	15						
3	Sarung Tangan	15						
4	Sepatu Boots Karot	15						
5	Helm Safety	15						
6	Bompi Proyek	15						
<b>JUMLAH TOTAL PENGALUAN</b>								<b>Rp. 459.620.000</b>


Terbilang : Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu-Rupiah



Menyetujui,  
Kepala Desa Randuputih  
**HAQNIHWAYATULLAFAH, S.T**  
NIP. 19800515201001 1 001



Tim Teknis  
**NUR KHAMIDAH, M. S.T**  
NIP. 19790205 200903 2 002



TPI Pembinaan  
**WAHYU MULISTAWAN, S.E**



Salaku PPK  
Dinas Pemasangan, Pemeliharaan, Keamanan dan Pertahanan  
**KOENI MARIZ, M.T**  
NIP. 19720214 200312 1 003

Gambar 4.9 Rencana Penggunaan Dana Program DAK Sanitasi 2022

### c. Sumber Daya Waktu

Sumber daya waktu juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau gagalnya implementasi kebijakan. Sumber daya waktu berfungsi sebagai pengingat agar sumber daya manusia dan finansial dapat berjalan dengan baik dan menjadi lebih efisien selama proses implementasi berlangsung. Di tahun 2022 Pemerintah Desa Randuputih

mendapat bantuan program DAK Sanitasi berupa pembangunan jamban dan tangki septic individual bagi rumah tangga terhitung dari bulan maret sampai juli.

Data dari hasil penelitian ini didapat melalui wawancara dengan Ibu Nur Khamidah Maulidiah selaku Kepala Seksi Penanganan Air Limbah Domestik Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo. Hasil wawancara dari Ibu Nur Khamidah Maulidiah, beliau mengatakan:

*“Program DAK Sanitasi ini dilakukan setiap tahun, jadi kegiatan DAK itu sekitar bulan maret hingga november. Nanti tahun depan dapat mengusulkan lagi untuk kegiatan tahun depan” (Wawancara dengan Ibu Nur Khamidah Maulidiah selaku Kepala Seksi Penanganan Air Limbah Domestik pada hari Senin 26 Juni 2023, pukul 10.00 WIB di Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo)*

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Satimin selaku Sekretaris Desa Randuputih. Hasil wawancara dengan Bapak Satimin, beliau mengatakan:

*“Program DAK ini dilakuan setiap tahunnya sekitar bulan maret-november. Di tahun 2022 itu Randuputih di target 3 bulan dari bulan maret sampai juli terakhir. Sebanyak 67 pembangunan, kurang seminggu dari tenggat waktu yang ditentukan oleh dinas terkait itu sudah selesai melakukan program tersebut” (Wawancara dengan Bapak Satimin selaku Sekretaris Desa Randuputih pada hari Senin 26 Juni 2023, pukul 09.00 WIB di Kantor Desa Randuputih)*



Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi program DAK Sanitasi dilakukan di setiap tahun. Desa Randuputih mendapat bantuan program DAK Sanitasi dimulai dari bulan maret hingga juli. Selama kurang dari waktu 3 bulan, pemerintah desa telah melaksanakan program tersebut.

Hasil observasi yang dilakukan peneliti menjelaskan bahwa pembangunan jamban sebagai implementasi program DAK Sanitasi di Desa Randuputih di tahun 2022 dilakukan di bulan juli hingga bulan oktober. Hal tersebut dibuktikan oleh hasil dokumentasi proses pembangunan jamban dan tangka septic.



Gambar 4.9 Proses penggalian tanah untuk pembuatan tangki septic



Gambar 4.10 Proses pembangunan tangki septik

### 3. Karakteristik Agen Pelaksana

Menurut Van Meter dan Van Horn menyebut fokus pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan publik. Hal tersebut penting dikarenakan kinerja implementasi kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh karakteristik yang cocok dan sesuai dengan agen pelaksana. Selain itu, ruang lingkup dan area pelaksanaan kebijakan harus diperhatikan dalam memilih agen pelaksana. Semakin luas lingkup pelaksanaan kebijakan, maka semakin banyak aktor pelaksanaan yang terlibat.

Dalam implementasi program DAK Sanitasi di Desa Randuputih agen pelaksana yang terlibat meliputi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo, Pemerintah Desa Randuputih dan kelompok swadaya masyarakat.

Data dari hasil penelitian ini didapat melalui wawancara dengan Ibu Nur Khamidah Maulidiah selaku Kepala Seksi Penanganan Air Limbah Domestik Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo. Hasil wawancara dari Ibu Nur Khamidah Maulidiah, beliau mengatakan:

“Agen pelaksana yang pertama itu Dinas Perkim. Terkait pengusulan pada tahap awal Dinas Perkim bersama dengan BAPPEDA dan Dinas Kesehatan. Pada saat pelaksanaannya karena program DAK ini sistemnya swakelola, jadi yang melaksanakan yaitu kelompok masyarakat di desa dan juga di support sama kepala desa. Kepala desa sebagai pengawas dan juga sebagai penanggung jawab atas kegiatan ini” (*Wawancara dengan Ibu Nur Khamidah Maulidiah selaku Kepala Seksi Penanganan Air Limbah Domestik pada hari Senin 26 Juni 2023, pukul 10.00 WIB di Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo*)

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Bapak Satimin selaku Sekretaris Desa Randuputih. Hasil wawancara Bapak Satimin, beliau mengatakan:

“Pemerintah desa membentuk kelompok swadaya masyarakat yang keanggotaannya lebih banyak dari lembaga desa, terutamanya itu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dan juga sebgaiian warga, ketua-ketua RT itu dilibatkan untuk menjadi pengurus. Untuk pengawasan jelas tetap dilakukan oleh Badan Pengawasan Desa (BPD) dan kepala desa menjadi penanggungjawab kegiatan program sanitasi ini, selain itu tidak ada kelompok informal yang terlibat” (*Wawancara dengan Bapak Satimin selaku Sekretaris Desa Randuputih pada hari*

*Senin 26 Juni 2023, pukul 09.00 WIB di Kantor Desa Randuputih)*

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa agen pelaksana yang terlibat Dalam implementasi program DAK Sanitasi di Desa Randuputih meliputi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo, Pemerintah Desa Randuputih dan kelompok swadaya masyarakat.

Kinerja implementasi kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh karakteristik yang cocok dan sesuai dengan agen pelaksana, sehingga keberadaan agen pelaksana juga menentukan keberhasilan atau kegagalan sebuah implementasi kebijakan. Dalam implementasi program DAK Sanitasi para agen pelaksana memiliki karakteristik yang profesional.

Data dari hasil penelitian ini didapat melalui wawancara dengan Bapak Satimin selaku Sekretaris Desa Randuputih. Hasil wawancara Bapak Satimin, beliau mengatakan:

*“Selama ini agen pelaksana melaksanakan program DAK Sanitasi sesuai petunjuk dan rencana kerja yang ada” (Wawancara dengan Bapak Satimin selaku Sekretaris Desa Randuputih pada hari Kamis 3 Agustus 2023, pukul 09.00 WIB di Kantor Desa Randuputih)*

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa agen pelaksana memiliki karakteristik bertanggungjawab dan profesional





Gambar 4.12 Hasil Akhir Pembangunan Jamban (Tampak Depan)



Gambar 4.13 Hasil Akhir Pembangunan Jamban (Tampak Samping)

#### 4. Komunikasi antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan ditentukan oleh komunikasi. Komunikasi dianggap mekanisme dan syarat utama penentu keberhasilan implementasi kebijakan. Semakin baik komunikasi dan koordinasi diantara semua agen pelaksana yang terlibat, maka semakin kecil kemungkinan kesalahan yang akan terjadi dan sebaliknya. Komunikasi yang terjalin antar agen pelaksana terjalin dengan baik. Sedangkan aktivitas pelaksana berupa kegiatan survei ke rumah calon penerima bantuan sanitasi.

Data dari hasil penelitian ini didapat melalui wawancara dengan Ibu Nur Khamidah Maulidiah selaku Kepala Seksi Penanganan Air Limbah Domestik Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo. Hasil wawancara dari Ibu Nur Khamidah Maulidiah, beliau mengatakan:

“Komunikasi yang terjalin itu baik. Sebelum pelaksanaan itu kami juga melakukan rapat koordinasi dengan desa yang menerima bantuan. Selain itu juga ada pengawasan lapangan dan monitoring dan evaluasi di akhir” (*Wawancara dengan Ibu Nur Khamidah Maulidiah selaku Kepala Seksi Penanganan Air Limbah Domestik pada hari Senin 26 Juni 2023, pukul 10.00 WIB di Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo*)

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Satimin selaku Sekretaris Desa Randuputih. Hasil wawancara Bapak Satimin, beliau mengatakan:

“Untuk komunikasinya sangat baik. Kalo pun ada permasalahan diselesaikan secara intern. Koordinasinya itu kami lakukan sosialisasi dengan warga dan evaluasi pekerjaan program”  
*(Wawancara dengan Bapak Satimin selaku Sekretaris Desa Randuputih pada hari Senin 26 Juni 2023, pukul 09.00 WIB di Kantor Desa Randuputih)*

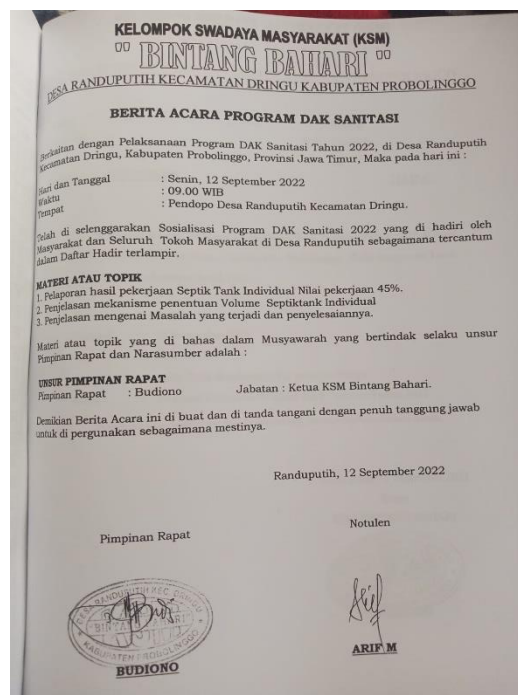
Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa komunikasi antar agen pelaksana terjalin dengan baik. Koordinasi yang dilakukan dalam pembangunan jamban sebagai implementasi program DAK Sanitasi dilakukan dari awal hingga akhir program DAK Sanitasi dilakukan.

Hasil observasi yang dilakukan peneliti menjelaskan bahwa komunikasi dan koordinasi yang dilakukan antar agen pelaksana terjalin dengan baik. Komunikasi dan koordinasi dilakukan dari awal hingga akhir program DAK Sanitasi dilaksanakan. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya dokumentasi pengawasan lapangan dan berita acara kegiatan evaluasi.





Gambar 4.14 Pengawasan Lapangan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo, Pemerintah Desa Randuputih dan Kelompok Masyarakat



Gambar 4.15 Berita Acara Program DAK Sanitasi

Aktivitas pelaksana dalam implementasi program DAK Sanitasi di Desa Randuputih yang dilakukan oleh agen pelaksana berupa survei ke rumah calon penerima bantuan pembangunan jamban.

Data dari hasil penelitian ini didapat melalui wawancara dengan Ibu Fitria Ningsih selaku penerima bantuan program DAK Sanitasi di Desa Randuputih. Dari hasil wawancara Ibu Fitria Ningsih mengatakan:

“Waktu itu saya cuma disurvei rumah, dilihat punya wc apa nggak. Setelah dinyatakan berhak, cuma dimintai fotocopy kk sama ktp aja” (*Wawancara dengan Ibu Fitria Ningsih selaku penerima bantuan program DAK Sanitasi pada hari Selasa 27 Juni 2023, pukul 11.00 WIB di rumah Ibu Fitria Ningsih*)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Abdul Gidarno selaku penerima bantuan program DAK Sanitasi di Desa Randuputih. Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Gidarno, beliau mengatakan:

“Awalnya itu ditanyain punya jamban ndak sama salah satu perangkat desanya. Lalu disurvei ke rumah, setelah dinyatakan berhak saya diundang ke balai desa buat sosialisasi bantuan jamban ini” (*Wawancara dengan Bapak Abdul Gidarno selaku penerima bantuan program DAK Sanitasi pada hari Selasa 27 Juni 2023, pukul 15.00 WIB di rumah Bapak Abdul Gidarno*)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa aktivitas pelaksana dalam implementasi program DAK Sanitasi berupa survei ke rumah calon rumah penerima manfaat dan sosialisasi program DAK Sanitasi kepada masyarakat.

Hasil observasi menjelaskan bahwa aktivitas pelaksana dalam menentukan kejelasan dan ketepatan sasaran dari program DAK Sanitasi, pemerintah Desa Randuputih melakukan survei lokasi calon penerima manfaat bantuan sanitasi serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai program DAK Sanitasi.

### **5. Sikap atau Kecenderungan Para Pelaksana**

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja implementasi kebijakan publik. Sikap mereka dipengaruhi oleh pandangan mereka bagaimana melihat suatu kebijakan dan bagaimana mereka melihat dampak dari kebijakan tersebut terhadap kepentingan organisasi dan pribadi mereka. Van Meter dan Van Horn mengartikan disposisi bahwa implementasi dimulai dengan terlebih dahulu menyaring pandangan para pelaksana mengenai batasan-batasan di mana sebuah kebijakan itu diimplementasikan.

Dalam variabel sikap dan kecenderungan agen pelaksana Van Meter dan Van Horn menjelaskan ada dua indikator yang mengatur kinerja implementasi kebijakan. Adapun indikator yang berdampak pada Implementasi Program Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi (DAK Sanitasi) di Desa Randuputih, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo antara lain sebagai berikut:

### **a. Kognisi terhadap kebijakan**

Kognisi dalam implementasi program merupakan pemahaman implementor terhadap program yang mempengaruhi implementasi program. Jika implementor tidak memiliki pemahaman terhadap program yang dilaksanakan, maka program yang dilaksanakan akan sulit untuk diimplementasikan.

Dalam implementasi program DAK Sanitasi di Desa Randuputih, seluruh agen pelaksana yang terlibat mulai dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo, Pemerintah Desa Randuputih serta masyarakat penerima bantuan memahami maksud dan tujuan dari program DAK Sanitasi. Para agen pelaksana sepakat adanya program DAK Sanitasi merupakan salah satu cara untuk berperilaku pola hidup sehat dan bersanitasi baik melalui jamban sehat.

Data dari hasil penelitian ini didapat melalui wawancara dengan Ibu Nur Khamidah Maulidiah selaku Kepala Seksi Penanganan Air Limbah Domestik Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo. Hasil wawancara dari Ibu Nur Khamidah Maulidiah, beliau mengatakan:

“Jelas kami memahami maksud dari program DAK ini bagaimana, tujuannya untuk meningkatkan akses sanitasi

dan juga agar masyarakat tidak bab sembarangan lagi karena sudah punya jamban sendiri” (*Wawancara dengan Ibu Nur Khamidah Maulidiah selaku Kepala Seksi Penanganan Air Limbah Domestik pada hari Senin 26 Juni 2023, pukul 10.00 WIB di Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo*)

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Satimin selaku Sekretaris Desa Randuputih. Hasil wawancara Bapak Satimin, beliau mengatakan:

“Dari beberapa stakeholder yang terlibat, baik dari masyarakat, pelaksana, pemerintah desa maupun BPD itu memahami terkait program ini. Bahwasannya tujuannya itu adalah berperilaku pola hidup sehat melalui jamban sehat tersebut” (*Wawancara dengan Bapak Satimin selaku Sekretaris Desa Randuputih pada hari Senin 26 Juni 2023, pukul 09.00 WIB di Kantor Desa Randuputih*)

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Fitria Ningsih selaku penerima bantuan program DAK Sanitasi di Desa Randuputih. Dari hasil wawancara Ibu Fitria Ningsih mengatakan:

“Saya sebagai penerima bantuan ini paham maksud dan tujuan dari bantuan ini. Tujuan dari program ini utamanya untuk kesehatan, kebersihan, dan juga pastinya mempermudah masyarakat untuk BAB di malam hari jadi tidak perlu lagi ke sungai” (*Wawancara dengan Ibu Fitria Ningsih selaku penerima bantuan program DAK Sanitasi pada hari Selasa 27 Juni 2023, pukul 11.00 WIB di rumah Ibu Fitria Ningsih*)

Selain itu peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Nur Kholifah selaku penerima bantuan program DAK Sanitasi di

Desa Randuputih. Dari hasil wawancara Ibu Nur Kholifah mengatakan:

“Saya paham tujuan dari program ini, yang pertama biar masyarakatnya tidak ke sungai lagi. Terus kan biar masyarakatnya bisa hidup sehat dan bersih” (*Wawancara dengan Ibu Nur Kholifah selaku penerima bantuan program DAK Sanitasi pada hari Selasa 27 Juni 2023, pukul 13.00 WIB di rumah Ibu Nur Kholifah*)

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Bapak Abdul Gidarno selaku penerima bantuan program DAK Sanitasi di Desa Randuputih. Dari hasil wawancara Bapak Abdul Gidarno mengatakan:

“Saya paham tujuan dari program ini, yang pertama biar masyarakatnya tidak ke sungai lagi. Terus kan biar masyarakatnya bisa hidup sehat dan bersih” (*Wawancara dengan Bapak Abdul Gidarno selaku penerima bantuan program DAK Sanitasi pada hari Selasa 27 Juni 2023, pukul 15.00 WIB di rumah Bapak Abdul Gidarno*)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa agen pelaksana yang terlibat dari pemerintah daerah hingga masyarakat penerima manfaat dalam implementasi program DAK Sanitasi di Desa Randuputih memahami maksud dan tujuan dari program DAK Sanitasi. Adanya program DAK Sanitasi bertujuan untuk membantu dan mempermudah masyarakat untuk bersanitasi dengan baik.

Hasil observasi yang dilakukan peneliti menjelaskan bahwa seluruh agen pelaksana memahami maksud dan tujuan adanya

pembangunan jamban sebagai implementasi program DAK Sanitasi di Desa Randuputih. Program DAK ini memiliki manfaat bagi masyarakat. Seluruh agen pelaksana sepakat bahwa program DAK Sanitasi bertujuan untuk berperilaku hidup bersih serta memudahkan masyarakat dalam bersanitasi. Hal tersebut dibuktinya banyaknya penerima manfaat bantuan sanitasi.

#### **b. Respons terhadap kebijakan**

Respon yang diberikan implementor terhadap suatu kebijakan akan mempengaruhi kemauan atau kemungkinan implementor dalam mengimplementasikan kebijakan. Kesungguhan implementor dalam melaksanakan kebijakan menunjukkan adanya respon implementor. Seluruh agen pelaksana merespon baik dan menerima adanya program DAK Sanitasi.

Data dari hasil penelitian ini didapat melalui wawancara dengan Ibu Nur Khamidah Maulidiah selaku Kepala Seksi Penanganan Air Limbah Domestik Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo. Hasil wawancara dari Ibu Nur Khamidah Maulidiah, beliau mengatakan:

“Kami sangat menerima dengan adanya program yang digagas oleh pemerintah pusat. Program DAK itu kan tujuannya baik untuk membantu ketersediaan bangunan sanitasi ini, apalagi untuk wilayah probolinggo sendiri akses sanitasi layaknya diangka 60%” (*Wawancara dengan Ibu Nur Khamidah Maulidiah selaku Kepala Seksi Penanganan*

*Air Limbah Domestik pada hari Senin 26 Juni 2023, pukul 10.00 WIB di Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo)*

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Satimin selaku Sekretaris Desa Randuputih. Hasil wawancara dengan Bapak Satimin mengatakan:

“Kami selaku pemerintah desa menerima dan antusias atas kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Program ini tujuannya untuk mengatasi permasalahan sanitasi khususnya pada kasus buang air besar di ruang terbuka yang dilakukan oleh masyarakat. Desa Randuputih ini banyakarganya yang belum memiliki sanitasi layak, maka dari itu kami mengajukan bantuan sanitasi ini kepada dinas terkait mulai sejak tahun 2020 hingga 2022 kemarin” (*Wawancara dengan Bapak Satimin selaku Sekretaris Desa Randuputih pada hari Senin 26 Juni 2023, pukul 09.00 WIB di Kantor Desa Randuputih*)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa agen pelaksana seperti Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo dan Pemerintah Desa Randuputih menerima adanya program DAK Sanitasi. Pemerintah Desa Randuputih menilai program DAK Sanitasi bisa membantu mengatasi permasalahan sanitasi bagi masyarakat Desa Randuputih, terbukti sejak tahun 2020 sampai 2022 pemerintah Desa Randuputih mengusulkan dan menerima bantuan DAK Sanitasi yang berupa pembangunan jamban dan tangka septik individual kepada dinas terkait.

Hasil observasi yang dilakukan peneliti menjelaskan bahwa seluruh agen pelaksana yang terlibat merespons baik adanya



program DAK Sanitasi yang digagas oleh pemerintah pusat. Para agen pelaksana menilai program DAK Sanitasi dapat membantu dan bermanfaat bagi masyarakat Desa Randuputih. Hal tersebut dibuktinya dengan adanya program DAK Sanitasi telah dilaksanakan sejak tahun 2020.

## **6. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik**

Menurut Van Meter dan Van Horn, lingkungan sosial, ekonomi dan politik menunjukkan bahwa lingkungan dan ranah implementasi dapat mempengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan itu sendiri. Selain faktor internal pelaksana program, faktor eksternal juga mempengaruhi implementasi sebuah program. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dan tidak stabil dapat menjadi masalah dalam implementasi sebuah program. Oleh sebab itu, untuk mengimplementasikan sebuah program harus memperhatikan kondusif lingkungan eksternal. Berikut pemaparan kondisi sosial, ekonomi, dan politik pada pelaksanaan program DAK Sanitasi:

### **a. Kondisi Sosial**

Kondisi sosial yang mencakup tanggapan masyarakat atau reaksi yang ditunjukkan oleh masyarakat mengenai kebijakan yang dapat berpengaruh pada keberhasilan atau kegagalan dalam proses implementasi kebijakan. Dalam implementasi program DAK

Sanitasi di Desa Randuputih mendapat tanggapan yang baik dari masyarakat.

Data dari hasil penelitian ini didapat melalui wawancara dengan Bapak Satimin selaku Sekretaris Desa Randuputih. Hasil wawancara dengan Bapak Satimin, beliau mengatakan:

“Tanggapan masyarakat dengan adanya program ini sangat baik, utamanya para penerimanya. Bahkan masyarakat saat ini yang belum menerima manfaat dari DAK Sanitasi itu berharap tahun-tahun berikutnya itu ada lagi program semacam ini”  
*(Wawancara dengan Bapak Satimin selaku Sekretaris Desa Randuputih pada hari Senin 26 Juni 2023, pukul 09.00 WIB di Kantor Desa Randuputih)*

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Fitria Ningsih selaku penerima bantuan program DAK Sanitasi di Desa Randuputih. Dari wawancara dengan Ibu Fitria Ningsih, beliau mengatakan:

“Sebagai penerima saya sangat senang karena bantuan ini gratis, saya tidak mengeluarkan biaya pembangunan sama sekali mulai dari awal hingga akhir pembangunan. Selain gratis, juga dibangun dengan bagus hanya terima jadi dan siap untuk digunakan tanpa ribet ke yang menerima bantuan ini”  
*(Wawancara dengan Ibu Fitria Ningsih selaku penerima bantuan program DAK Sanitasi pada hari Selasa 27 Juni 2023, pukul 11.00 WIB di rumah Ibu Fitria Ningsih)*

Selain itu peneliti juga melakukan wawawancara dengan Ibu Nur Kholifah selaku penerima bantuan program DAK Sanitasi di Desa Randuputih. Dari wawancara dengan Ibu Nur Kholifah, beliau mengatakan:

“Untuk bangun jamban sama septic tank itu kan butuh biaya yang besar. Saya dikasih bantuan seperti ya sangat senang sekali, apalagi gratis tidak keluar uang sama sekali. Saya juga tidak perlu ke sungai lagi kalau malam-malam” (*Wawancara dengan Ibu Nur Kholifah selaku penerima bantuan program DAK Sanitasi pada hari Selasa 27 Juni 2023, pukul 13.00 WIB di rumah Ibu Nur Kholifah*)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Abdul Gidarno selaku penerima bantuan program DAK Sanitasi di Desa Randuputih. Hasil wawancara dari Bapak Abdul Gidarno, beliau mengatakan:

“Kami sebagai penerima program seperti ini tentunya senang dan sangat bangga sekali terhadap pemerintah, dengan adanya seperti ini sudah sedikit banyak membantu mengatasi masalah yang ada di masyarakat yaitu masalah sanitasi” (*Wawancara dengan Bapak Abdul Gidarno selaku penerima bantuan program DAK Sanitasi pada hari Selasa 27 Juni 2023, pukul 15.00 WIB di rumah Bapak Abdul Gidarno*)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pembangunan jamban sebagai implementasi program DAK Sanitasi di Desa Randuputih mendapat tanggapan baik dari masyarakat, terutamanya masyarakat yang merasakan manfaatnya. Masyarakat penerima manfaat program sanitasi ini senang karena pembangunan jamban tidak mengeluarkan biaya, selain itu program ini sangat membantu dan bermanfaat bagi masyarakat. Sedangkan masyarakat yang belum merasakan manfaatnya, berharap ditahun berikutnya dapat menerima bantuan sanitasi tersebut.

Sementara hasil observasi yang dilakukan peneliti menjelaskan pembangunan jamban sebagai implementasi program DAK Sanitasi di Desa Randuputih mendapat respons baik dari masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya data penerima manfaat bantuan sanitasi di tahun 2022 sebanyak 67 kepala rumah tangga dari 5 dusun yang ada di Desa Randuputih.

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO  
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN  
PERTANAHAN  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
Jl. Raya Dringu No. 81 Telp./Fax. (0335) 433631  
PROBOLINGGO 67271

---

DAFTAR PENERIMA MANFAAT

Lokasi Dusun Randulimo

No	Nama Kepala Keluarga	Jumlah Anggota Keluarga	KK	Pekerjaan	Rata-rata Penghasilan/ Bulan	Alamat
1	Agus	4	1	Nelayan	900.000	Randulimo Rt.01/01
2	Mentik	3	1	Menjahit	850.000	Randulimo Rt.01/01
3	Mening Rusiati	4	1	Ibu RT	650.000	Randulimo Rt.01/01
4	Syarif	5	1	Kuli	850.000	Randulimo Rt.01/01
5	Robiyanto	3	1	Kuli	750.000	Randulimo Rt.02/01
6	Misri	3	2	IbuRT	500.000	Randulimo Rt.02/01
7	Sutarji	3	1	Kuli	750.000	Randulimo Rt.02/01
8	Mujiono	6	2	Kuli	650.000	Randulimo Rt.02/01
9	Sayani	1	1	IbuRT	500.000	Randulimo Rt.02/01
10	Sjamsul Bahri	7	2	Kuli	800.000	Randulimo Rt.02/01
11	Sumarno	5	1	Kuli	850.000	Randulimo Rt.03/01
12	Buamar	6	2	Tani	750.000	Randulimo Rt.03/01
13	Teguh Santoso	5	1	Supir	850.000	Randulimo Rt.03/01
14	Rohman Holip	4	1	Kuli	750.000	Randulimo Rt.03/01
<b>Total</b>		<b>59</b>	<b>18</b>			

4.14 Daftar Penerima Bantuan Sanitasi Tahun 2022



62	Abdul Adhim	4	1	Nelayan	750.000	Parsean Rt.12/05
63	Seneye	4	1	Nelayan	600.000	Parsean Rt.12/05
64	Jaini	3	1	Nelayan	700.000	Parsean Rt.12/05
65	Abdul Wahid	4	1	Nelayan	800.000	Parsean Rt.12/05
66	Kusmanto	4	1	Nelayan	700.000	Parsean Rt.12/05
67	Seneman	5	1	Nelayan	700.000	Parsean Rt.12/05
Total		46	12			

4.17 Daftar Penerima Bantuan Sanitasi Tahun 2022

### b. Kondisi Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi hal yang penting dalam kehidupan manusia. Menurut Van Meter dan Van Horn lingkungan ekonomi dalam implementasi program adalah tersedianya sumberdaya ekonomi yang memadai pada lingkungan eksternal pelaksanaan program. Kondisi ekonomi masyarakat Desa Randuputih tidak terlalu berpengaruh terhadap implementasi program DAK Sanitasi.

Data dari hasil penelitian ini didapat melalui wawancara dengan Bapak Satimin selaku Sekretaris Desa Randuputih. Hasil wawancara dengan Bapak Satimin, beliau mengatakan:

“Berpengaruhnya tidak signifikan karena dari segi pendanaan sendiri sudah murni 100% ditangani oleh dana DAK tersebut. Jadi warga hanya berswadaya di konsumsi saja. Itu pun tidak diwajibkan” (*Wawancara dengan Bapak Satimin selaku Sekretaris Desa Randuputih pada hari Senin 26 Juni 2023, pukul 09.00 WIB di Kantor Desa Randuputih*)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat tidak terlalu berpengaruh dalam proses pembangunan jamban sebagai implementasi program DAK Sanitasi di Desa Randuputih. Biaya pembangunan jamban menggunakan dana alokasi dari pemerintah pusat. Adanya dana swadaya dari masyarakat tidak ada paksaan dari pihak manapun. Hal tersebut di buktikan dengan data laporan penggunaan dana program DAK Sanitasi tahun 2022

**LAPORAN PENGGUNAAN DANA (LPD) 25%  
TERMIN I ( Satu )  
PROGRAM DAK SANITASI 2022**

DESA : RANDUPUTIH  
KABUPATEN : BINTANG BAHARI  
KECAMATAN : DRINGU  
KABUPATEN : PROBOLINGGO

No	Uraian	Kebutuhan Total	Pengajuan Termin I	Volume		Unit / satuan	Harga satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
				Real Kebutuhan	Jumlah Kumulatif			
<b>PERSIAPAN</b>								
1	Papan Informasi dan papan kegiatan	2	2,00	2,00				
2	Sarung Tangan	15	15	15		Ls	250.000	500.000
3	Sepatu Boots Karet	15	15	15		Bh	7.000	105.000
4	Helm Safety	15	15	15		Bh	106.400	1.596.000
5	Rongga Protek	15	15	15		Bh	70.000	1.050.000
6	Penutupokapan ATK	1	1	1		BH	50.000	750.000
7	Cangkul	5	5	5		LS	297.750	297.750
8	Sekop	5	5	5		BH	85.000	425.000
9	Ancu	1	1	1		BH	85.000	425.000
10						Bh	600.000	600.000
<b>BAHAN</b>								
1	Batu merah	53.500	10.000	10.000		Bh	600	6.000.000
2	Bendrat	41	10	10		Kg	22.000	220.000
3	Batu beton Ø 8 mm	760	155	155		Lir	60.000	9.300.000
4	Batu beton Ø 80 cm	134	34	34		Bh	120.000	4.080.000
5	Batu	290	60	60		Kg	12.000	720.000
6	Kayu hutan balok	208	51	51		Btng	38.500	1.963.500
7	Kioset jongkok	67	17	17		Bh	250.000	4.250.000
8	Koral beton	40	10	10		M3	275.000	2.750.000
9	Pasir urug	26	6	6		M3	90.000	540.000
10	Pasir pasang	90	20	20		M3	150.000	3.000.000
11	Pasir beton	55	14	14		M3	250.000	3.500.000
12	Semen/PC (40 kg)	850	207	207		Zak	54.000	11.178.000
13	Paku	71	16	16		Kg	21.000	336.000
14	Cat Dinding	97	20	20		Kg	40.000	800.000
15	Plamir Dinding	37	10	10		Kg	25.000	250.000
16	Plywood	55	15	15		Lbr	152.500	2.287.500
17	Pipa PVC Air Limbah SNI MOF Ø 4"	67	17	17		Lir	351.000	5.967.000
18	Knee Ø 4"	10	3	3		Bh	25.000	425.000
19	Pipa GI Medium Ø 1"	134	34	34		Lir	240.200	720.600
20	Pipa T 4"	134	34	34		Bh	27.400	931.600
21	Roster Bata	67	17	17		Bh	12.500	425.000
22	Pintu Standart	138	35	35		Bh	371.000	6.307.000
23	Kaso-kaso 5 x 7 cm	30	10	10		Btng	58.500	1.977.500
24	Seng Galvalum	30	10	10		Lbr	320.000	3.200.000
<b>UPAH</b>								
1	Tukang	500	120	120		Hok	100.000	7.000.000
2	Pekerja	1.015	270	270		Hok	85.000	10.965.000
<b>Jumlah Total</b>								<b>Rp. 94.842.450</b>

Terbilang : (Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah.)

Kepala Desa Randuputih

**KEPALA DESA**

**MISTAFUL HUDAN, S.H**

NIP. 19800515201001 1 001

Menyetujui,

TFL Teknik

**HAQNI RIWAYATUL FAIZAH, S.T**

TFL Pemberdayaan

**WAHYU SULISTIAWAN, S.E**

Pengawas Teknis Kegiatan

**RULIN SRULLAH, S.T, M.Si**

NIP. 19781208 20021 2 1 003

Tim Teknis

**NUR KHAMIDAH, M.S.T**

NIP. 19790205 200903 2 003

Pengguna Anggaran Selaku PPK

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kecamatan Probolinggo

**PPKON**

**R. OEMAS-SARIEF, S.T, M.T**

Pembina

NIP. 19720719 200312 1 003

Gambar 4.18 Laporan Penggunaan Data Termin Satu Program DAK Sanitasi Tahun 2022



**LAPORAN PENGGUNAAN DANA (LPD) 45%  
TERMIN II ( Dua )  
PROGRAM DAK SANITASI 2022**

DESA : RANDUPUTIH  
KEM. KAW. : BINTANG BAHARI  
KECAMATAN : DRINGU  
KABUPATEN : PROBOLINGGO

No	Uraian	Kebutuhan Total	Volume			Unit / satuan	Harga satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
			Pengajuan Termin II	Real Kebutuhan	Jumlah Kumulatif			
<b>PERSIAPAN</b>								
1	Perencanaan ATK		2,00	2,00		La	500.000	1.000.000
2	Cangkul		5	5		Bh	85.000	425.000
3	Sekop		2	5		Bh	85.000	425.000
4	Aksi			2		Bh	600.000	1.200.000
5	Paket Nama Kegiatan		67	67		BH	55.000	3.685.000
6	Rapat Evaluasi		3	3		LS	600.000	1.800.000
7	Tes uji beton + Transport		1	1		LS	3.500.000	3.500.000
8	Mesin sedot air		3	3		BH	180.000	540.000
<b>BAHAN</b>								
1	Bata merah	53.500	25.000	25.000	-	Bh	600	15.000.000
2	Bendrat	41	18	18	-	Kg	22.000	396.000
3	Besi beton Ø 8 mm	760	350	350	-	Ljr	60.000	21.000.000
4	Besi beton Ø 80 cm	134	60	60	-	Bh	120.000	7.200.000
5	Buk	290	111	111	-	Kg	12.000	1.332.000
6	Kayu hutan balok	208	95	95	-	Btng	38.500	3.687.500
7	Kloset jongkok	67	30	30	-	Bh	250.000	7.500.000
8	Koral beton	40	20	20	-	M3	275.000	5.500.000
9	Pasir urug	26	15	15	-	M3	90.000	1.350.000
10	Pasir pasang	90	40	40	-	M3	150.000	6.000.000
11	Semen beton	55	25	25	-	M3	250.000	6.250.000
12	Semen/PC (40 kg)	850	400	400	-	Zak	54.000	21.600.000
13	Paku	71	31	31	-	Kg	21.000	651.000
14	Cat Dinding	97	45	45	-	Kg	40.000	1.800.000
15	Plywood	37	20	20	-	Kg	25.000	500.000
16	Pipa PVC Air Limbah SNI MOF Ø 4"	55	30	30	-	Lbr	152.500	4.575.000
17	Knee Ø 4"	67	30	30	-	Ljr	351.000	10.530.000
18	Pipa GI Medium Ø 1"	67	30	30	-	Bh	25.000	750.000
19	Pipa T 4"	10	5	5	-	Ljr	240.200	1.201.000
20	Roster Bata	134	60	60	-	Bh	27.400	1.644.000
21	Pintu Standart	134	60	60	-	Bh	12.500	750.000
22	Kaso-kaso 5 x 7 cm	67	30	30	-	Bh	371.000	11.130.000
23	Seng Galvalum	138	50	50	-	Btng	56.500	2.825.000
24	Seng Galvalum	30	15	15	-	Lbr	320.000	4.800.000
<b>II UPAH</b>								
1	Tukang	500	450	259	-	Hok	100.000	25.900.000
2	Pekerja	1.015	215	581	-	Hok	85.000	49.385.000
<b>Jumlah Total</b>							<b>Rp.</b>	<b>225.801.500</b>

Terbilang : (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Satu Ribu Lima Ratus Rupiah.)

Menyetujui,  
TFL Teknik

*[Signature]*  
**HAONI RHWAYATUL FAIZAH, S.T**

TFL Pemberdayaan

*[Signature]*  
**WAHYU SULISTIAWAN, S.E**

Tim Teknis

Pengguna Anggaran Selaku PPK  
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  
Kabupaten Probolinggo

*[Signature]*  
**NUR KHAMBDAH M. S.T**  
NIP. 19790205 200903 2 003

Kepala Desa Randuputih

*[Signature]*  
**MISTAFUL HUDAN, S.H**  
NIP. 19600512071001 1 001  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  
Kabupaten Probolinggo

*[Signature]*  
**MUHAMMAD NUR BAH, S.T, M.Si**  
NIP. 19781006 200312 1 003

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  
Kabupaten Probolinggo

*[Signature]*  
**DEWI KURNIAH, S.T, M.T**  
Pembina  
NIP. 19720719 200312 1 003

Gambar 4.19 Laporan Penggunaan Data Termin Dua Program DAK Sanitasi Tahun 2022

**LAPORAN PENGGUNAAN DANA (LPD) 30%  
TERMIN III ( Tiga )  
PROGRAM DAK SANITASI 2022**

DESA : RANDUPUTIH  
KABUPATEN : BINTANG BAHARI  
KECAMATAN : DRINGU  
KABUPATEN : PROBOLINGGO

No	Uraian	Volume				Unit / satuan	Harga satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
		Kebutuhan Total	Pengajuan Termin III	Real Kebutuhan	Jumlah Kumulatif			
<b>I. PERSIAPAN</b>								
1	Perangkatkan ATK	1	1	1		Ls	273.150	273.150
2	Rapat Evaluasi	2	2	2		LS	600.000	1.200.000
3	Pengadaan RKM dan LPJ	3	3	3		LS	1.000.000	3.000.000
<b>II. BAHAN</b>								
1	Bata merah	53.500	15.400	15.400	-	Bh	600	9.240.000
2	Bendrat	41	13	13	-	Kg	22.000	286.000
3	Besi beton Ø 8 mm	760	315	315	-	Ljr	60.000	18.900.000
4	Buis beton Ø 80 cm	134	40	40	-	Bh	120.000	4.800.000
5	Juk	290	119	99	-	Kg	12.000	1.188.000
6	Kayu hutan balok	208	62	62	-	Btng	38.500	2.387.000
7	Kloset jongkok	40	20	20	-	Bh	250.000	5.000.000
8	Korot beton	26	5	5	-	M3	275.000	5.500.000
9	Pasir urug	90	30	30	-	M3	90.000	450.000
10	Pasir pasang	55	19	19	-	M3	150.000	4.500.000
11	Semen/PC (40 kg)	850	243	243	-	Zak	250.000	4.750.000
12	Paku	71	24	24	-	Kg	54.000	13.122.000
13	Cat Dinding	97	32	32	-	Kg	21.000	504.000
14	Plamir Dinding	37	8	8	-	Kg	40.000	1.280.000
15	Plywood	55	10	10	-	Kg	25.000	450.000
16	Pipa PVC Air Limbah SNI MOF Ø 4"	67	5	5	-	Lbr	152.500	1.525.000
17	Knee Ø 4"	67	20	20	-	Ljr	351.000	1.755.000
18	Knee Ø 1"	101	2	2	-	Bh	25.000	500.000
19	Pipa GI Medium Ø 1"	134	2	2	-	Ljr	240.200	480.400
20	Pipa T 4"	134	40	40	-	Bh	27.400	1.096.000
21	Roster Bata	67	40	40	-	Bh	12.500	500.000
22	Pintu Standart	138	20	20	-	Bh	371.000	7.420.000
23	Kaso-kaso 5 x 7 cm	30	53	53	-	Btng	56.500	2.994.500
24	Seng Galvalum	500	165	165	-	Lbr	320.000	1.600.000
<b>III. UPAH</b>								
1	Tukang	500	295	175	-	Hok	100.000	17.500.000
2	Pekerja	1.015	165	315	-	Hok	85.000	26.775.000
<b>Jumlah Total</b>							<b>Rp.</b>	<b>138.976.050</b>

Terbilang : (Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Puluh Rupiah.)

Menyetujui,  
TFL Teknik

*[Signature]*  
**HAONI RIWAYATUL FAIZAH, S.T**

Tim Teknis

*[Signature]*  
**NUR KHAMIDAH M, S.T**  
NIP. 19790205 200903 2 003

Probolinggo, 2022

Dibuat Oleh:  
KSM "Bintang Bahari"  
KABUPATEN PROBOLINGGO

*[Signature]*  
**WAHYU SULISTIAWAN, S.E**

Kepala Desa Randu Putih

*[Signature]*  
**MUSTAFAH HUDA, S.H**  
NIP. 19800515201001 1 001

Pengguna Anggaran Selaku PPK  
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  
Kecamatan Probolinggo

*[Signature]*  
**E. OLMAR HARIF, S.T, M.T**  
NIP. 19720719 200312 1 003

Gambar 4.20 Laporan Penggunaan Data Termin Tiga Program DAK Sanitasi Tahun 2022

### c. Kondisi Politik

Lingkungan politik juga tidak kalah penting dalam mempengaruhi pelaksanaan suatu program selain lingkungan sosial dan lingkungan ekonomi. Dukungan elit politik juga dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam implementasi program DAK Sanitasi tidak ada dukungan atau keterlibatan elit politik, sehingga tidak ada intervensi dari kelompok politik mana pun.

Data dari hasil penelitian ini didapat melalui wawancara Ibu Nur Khamidah Maulidiah selaku Kepala Seksi Penanganan Air Limbah Domestik Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo. Dari hasil wawancara dari Ibu Nur Khamidah Maulidiah, beliau mengatakan:

“Tidak ada. Untuk kegiatan DAK ini murni usulan dari pemerintah daerah, dalam artian dari Dinas Perkim bersama BAPPEDA dan Dinas Kesehatan jadi dirasa tidak ada intervensi dari pihak luar. Jadi kegiatan ini diprioritaskan untuk yang membutuhkan, warga yang tidak punya jamban”  
*(Wawancara dengan Ibu Nur Khamidah Maulidiah selaku Kepala Seksi Penanganan Air Limbah Domestik pada hari Senin 26 Juni 2023, pukul 10.00 WIB di Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo)*

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Satimin selaku Sekretaris Desa Randuputih. Dari wawancara dengan Bapak Satimin mengatakan:

“Alhamdulillah selain kami menghindari terkait dengan kelompok-kelompok politik tadi itu hingga detik ini tidak ada. Kami murni proposal dari pengajuan desa atas usulan masyarakat ditujukan kepada dinas terkait itu selesai, tidak ada intervensi politik sama sekali dalam kegiatan ini” (*Wawancara dengan Bapak Satimin selaku Sekretaris Desa Randuputih pada hari Senin 26 Juni 2023, pukul 09.00 WIB di Kantor Desa Randuputih*)

Berdasarkan hasil wawancara diatas disimpulkan bahwa Implementasi program DAK Sanitasi di Desa Randuputih tidak ada keterlibatan atau dukungan dari kelompok politik mana pun sehingga tidak ada intervensi dari pihak luar. Pembangunan jamban sebagai implementasi program DAK Sanitasi merupakan program bantuan sosial untuk membantu masyarakat mengatasi masalah sanitasi.

Hasil observasi yang dilakukan peneliti menjelaskan bahwa implementasi program DAK Sanitasi di Desa Randuputih tidak ada kaitannya ke arah politik, sehingga tidak ada keterlibatan atau dukungan dari kelompok politik. Pembangunan jamban merupakan salah satu bentuk dari bantuan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan akses sanitasi di masyarakat.

### **C. Analisis dan Interpretasi Data**

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2010) yang terdiri dari empat komponen yaitu: Pengumpulan data, Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan.

Dalam skripsi ini, peneliti berupaya meneliti sebuah realita yang terjadi pada program DAK Sanitasi, sesuai dengan judul ini yaitu Implementasi Program Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi (DAK Sanitasi) di Desa Randuputih, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi mengenai analisis implementasi program DAK Sanitasi sebagai berikut:

#### **1. Implementasi Program Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi (DAK Sanitasi) di Desa Randuputih, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo**

Dalam penelitian ini pendekatan teori yang di gunakan dalam menganalis judul skripsi ini yaitu Implementasi Program Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi (DAK Sanitasi) di Desa Randuputih, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo adalah teori yang dikemukakan oleh Donald Van Meter dan Van horn (dalam Agustino, 2020) menyatakan implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh

individu atau pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah dibuat dalam suatu kebijakan. Argumen tersebut digambarkan bahwa implementasi kebijakan berbanding lurus dari kebijakan publik, implementator, dan performa kebijakan. Van Meter and Van Horn menyebut 6 variabel yang membentuk hubungan antara kebijakan dan kinerja yaitu :

## **1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan**

### **a. Ukuran Kebijakan**

Ukuran atau pedoman kebijakan merupakan sebuah tolak ukur yang digunakan untuk menilai apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal diimplementasikan. Pembangunan jamban sebagai implementasi program DAK Sanitasi di Desa Randuputih ukuran atau pedoman yang digunakan dalam implementasi program DAK Sanitasi mengacu pada peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia yang terkemas dalam *e-book* Petunjuk Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Bidang Sanitasi Tahun 2022. peraturan tersebut dijelaskan bahwa Program DAK Sanitasi merupakan program skala nasional dengan sumber dana berasal dari pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah daerah dengan tujuan membantu tersedianya bangunan sanitasi. Dalam petunjuk yang sama juga dijelaskan mengenai ketentuan umum, proses pelaksanaan, dan ketentuan teknis dari pelaksanaan program DAK Sanitasi.

Dalam hal ini ukuran kebijakan dalam implementasi program DAK Sanitasi di Desa Randuputih sudah sesuai dengan teori implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2020) yang bahwa ukuran dan tujuan kebijakan berlandaskan pada kepentingan utama penentu kinerja kebijakan. Kinerja implementasi kebijakan dapat dinilai keberhasilannya apabila ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan sesuai dengan sosio-kultur dari tempat implementasi kebijakan tersebut.

**b. Tujuan Kebijakan**

Sebuah kebijakan tentunya memiliki sebuah tujuan. Tujuan kebijakan publik yaitu menciptakan sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan permasalahan di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dari hasil wawancara menjelaskan bahwa tujuan pembangunan jamban sebagai implementasi program DAK Sanitasi ialah menuntaskan target Sustainable Development Programs (SGDs) 2030 untuk akses sanitasi layak mencapai 100%, kasus buang air besar sembarangan 0%. Tujuan implementasi program DAK Sanitasi di Desa Randuputih masih belum sepenuhnya tercapai, akses sanitasi layak di Desa Randuputih masih di angka 78%. Meskipun angka tersebut cukup tinggi, namun masih terdapat masyarakat yang belum merasakan manfaat dari program DAK Sanitasi.

Ada sebanyak 119 KK di Dusun Parsean Desa Randuputih yang belum memiliki jamban. Hal ini disebabkan oleh jarak antar rumah warga yang berdampingan sehingga ketidakterediaan lahan inilah sulit untuk dibangun jamban dan septic tank individual.

Meskipun tujuan program DAK Sanitasi belum tercapai secara keseluruhan namun bila dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn bahwa tujuan kebijakan tersebut sudah sesuai. Meter dan Van Horn menjelaskan tujuan kebijakan berlandaskan pada kepentingan utama penentu kinerja kebijakan. Kinerja implementasi kebijakan dapat dinilai keberhasilannya apabila ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan sesuai dengan keadaan dari tempat implementasi kebijakan tersebut. Apabila ukuran dan tujuan dari sebuah kebijakan tidak sesuai maka akan menyebabkan kegagalan dalam pelaksanaan sebuah kebijakan. Sepadan dengan teori implementasi kebijakan (dalam Budi Winarno, 2002) yang menjelaskan dalam implementasi tujuan suatu program yang akan dilaksanakan harus teridentifikasi dan diukur karena implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan-tujuan tidak dipertimbangkan.

### **c. Sasaran Kebijakan**

Keberhasilan dari sebuah kebijakan publik juga dipengaruhi oleh sasaran kebijakan. Sasaran kebijakan yaitu target group atau



kelompok yang akan menjalankan suatu kebijakan. Dalam pembangunan jamban sebagai implementasi program DAK Sanitasi yang menjadi sasaran atas program ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu masyarakat miskin yang belum memiliki jamban.

Sasaran kebijakan dalam implementasi program DAK Sanitasi sesuai dengan teori menurut Van Meter dan Van Horn. Selain itu salah satu dari keberhasilan implementasi kebijakan (dalam Subarsono, 2005) menyatakan bahwa standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Jika standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multiinterpretasi dan mudah menimbulkan konflik diantara agen pelaksana maupun masyarakat.

## **2. Sumber Daya**

### **a. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia menjadi salah satu faktor menentu keberhasilan dari proses implementasi kebijakan. Sumber daya manusia sebagai aktor yang akan menjalankan sebuah kebijakan. Dalam implementasi program DAK Sanitasi di Desa Randuputih, sumber daya manusia yang terlibat cukup banyak yaitu sekitar 11 orang pekerja yang terdiri dari tukang dan kuli bangunan.

Dalam hal ini kesesuaian sumber daya manusia dengan teori implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn dalam implementasi program DAK Sanitasi di Desa Randuputih sudah sesuai. Sama halnya yang dijelaskan (dalam buku Analisis Kebijakan Publik oleh subarsno, 2005) adanya dukungan sumberdaya menjadi faktor penting dalam sebuah implementasi, yaitu implementasi kebijakan perlu dukungan dari sumberdaya manusia maupun sumberdaya non manusia.

#### **b. Sumber Daya Finansial**

Sumber daya finansial merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan atau kegagalan dari sebuah implementasi kebijakan. Sumber daya finansial digunakan untuk membiayai seluruh proses kebijakan berangsur. Dalam implementasi program DAK Sanitasi di Desa Randuputih bahwa sumber dana berasal dari pemerintah pusat. Dana yang di terima pemerintah Desa Randuputih untuk pembangunan jamban ini cukup besar. Selama proses pembangunan jamban berlangsung Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo, Pemerintah Desa Randuputih dan masyarakat penerima bantuan tidak mengeluarkan biaya pembangunan. Dana swadaya ada dikarenakan inisiatif dari masyarakat penerima bantuan program DAK Sanitasi untuk

memberi konsumsi kepada pekerja selama proses pembangunan jamban berlangsung.

Sumber daya finansial dalam implemetasi program DAK Sanitasi di Desa Randuputih sudah sesuai dengan teori implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn. Dalam implementasi kebijakan, sumber daya finansial digunakan sebagai penunjang selama proses implementasi berlangsung. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Daniel Mazmanian & Paul A. Sabatier (dalam Agustino, 2020) yang menjelaskan bahwa tersedianya dana pada tingkat batas ambang tertentu sangat diperlukan agar terbuka peluang untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan.

### **c. Sumber Daya Waktu**

Sumber daya waktu dalam implementasi kebijakan sangat dibutuhkan. Sumber daya waktu merupakan keterkaitan dalam pemanfaatan waktu yang digunakan dalam menjalannya sebuah kegiatan atau kebijakan. Di tahun 2022 Desa Randuputih mendapat bantuan program DAK Sanitasi dengan target pembangunan selama 3 bulan sejak bulan maret hingga juli. Namun fakta dilapangan menjelaskan bahwa pembangunan jamban sebagai implementasi program DAK Sanitasi di Desa Randuputih masih dilakukan di bulan juli hingga oktober.

Dalam hal ini sumber daya waktu dalam implementasi program DAK Sanitasi tidak sesuai dengan teori yang disampaikan Van Meter dan Van Horn yang menjelaskan bahwa sumber daya waktu digunakan sebagai penguat agar sumber daya manusia berjalan dengan baik dan menjadi lebih efisien selama proses implementasi berlangsung.

### **3. Karakteristik Agen Pelaksana**

Kinerja implementasi kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh karakteristik yang cocok dan sesuai dengan agen pelaksana. Dalam implementasi program DAK Sanitasi di Desa Randuputih agen pelaksana yang terlibat cukup banyak yaitu Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo, Pemerintah Desa Randuputih, dan kelompok masyarakat. Dalam pelaksanaan program, agen pelaksana memiliki karakteristik yang bertanggung jawab dan profesional sehingga rencana dan hasil dari program yang dijalankan sama.

Karakteristik agen pelaksana menjadi salah satu faktor penentu atau kegagalan dari sebuah implementasi kebijakan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang disampaikan Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2020) menjelaskan bahwa organisasi formal dan informal turut terlibat dalam implementasi kebijakan. Keduanya sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat

dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat dan cocok dengan agen pelaksana.

#### **4. Sikap dan Kecenderungan Para Pelaksana**

##### **a. Kognisi terhadap kebijakan**

Kognisi terhadap kebijakan merupakan pemahaman implementator mengenai program yang hendak dijalankan. Apabila implementator tidak memiliki pemahaman terhadap program, maka program yang dilaksanakan akan sulit untuk diimplementasikan. Implementasi program DAK Sanitasi seluruh agen pelaksana memahami maksud dan tujuan adanya pembangunan jamban sebagai implementasi program DAK Sanitasi di Desa Randuputih. Program DAK Sanitasi memiliki manfaat bagi masyarakat, seluruh agen pelaksana sepakat bahwa program DAK Sanitasi untuk berperilaku hidup bersih serta memudahkan masyarakat dalam bersanitasi.

Dalam hal ini kognisi agen pelaksana terhadap kebijakan menjadi salah satu penyebab keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan, hal tersebut sesuai dengan teori implementasi kebijakan (dalam Agustiono, 2020) yang menjelaskan dalam implementasi kebijakan, kognisi agen pelaksana dipengaruhi oleh pandangan mereka bagaimana melihat suatu kebijakan dan bagaimana mereka melihat dampak dari sebuah

kebijakan baik dalam hal kepentingan organisasi maupun kepentingan pribadi.

#### **b. Respons terhadap kebijakan**

Respons yang diberikan implementator terhadap suatu kebijakan akan mempengaruhi keberhasilan kebijakan. Kesungguhan implementator dalam melaksanakan kebijakan menunjukkan adanya respons yang baik oleh implementator.

Implementasi program DAK Sanitasi di Desa Randuputih mendapat respons baik dari seluruh agen pelaksana. Para pelaksana menerima adanya program DAK Saniasi. Adanya program DAK Sanitasi ini dianggap dapat membantu dan bermanfaat bagi masyarakat Desa Randuputih. Adanya program DAK Sanitasi juga direspons baik oleh masyarakat, terbukti dari sejak tahun 2020 sampai 2022 banyak warga yang merasakan manfaat dari adanya program DAK Sanitasi.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2020) yang menjelaskan sikap penerimaan atau penolakan dari pelaksana memiliki pengaruh atas keberhasilan atau kegagalan sebuah implementasi kebijakan publik. Hal tersebut dapat terjadi karena sebuah kebijakan yang diterapkan bukan hasil perumusan agen pelaksana yang terlibat secara langsung mengenai permasalahan yang dirasakan agen pelaksana.

## **5. Komunikasi antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana**

Komunikasi dianggap mekanisme dan syarat utama penentu keberhasilan implementasi kebijakan. Semakin baik komunikasi dan koordinasi yang dilakukan antar agen pelaksana, maka semakin kecil kemungkinan kesalahan yang akan terjadi dan sebaliknya.

Dalam implementasi program DAK Sanitasi di Desa Randuputih komunikasi dan koordinasi yang terjalin antar agen pelaksana terjalin dengan baik. Sedangkan untuk aktivitas pelaksanaannya, pemerintah desa melakukan survei ke rumah calon penerima bantuan untuk memastikan kejelasan dan ketepatan sasaran dari program DAK Sanitasi.

Komunikasi menjadi kunci utama dalam sebuah implementasi kebijakan. Komunikasi yang terjalin antar agen pelaksana dalam implementasi program DAK Sanitasi di Desa Randuputih sesuai dengan teori menurut Van Meter dan Van Hord. Hal tersebut juga sepadan dengan pendapat Edward III (dalam Winarno, 2008) menyatakan komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah proses implementasi kebijakan, karena tanpa adanya komunikasi yang baik antar agen pelaksana maupun agen pelaksana kepada kelompok sasaran kebijakan maka akan sangat sulit sebuah kebijakan untuk diimplementasikan.

## **6. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik**

### **a. Kondisi Sosial**

Kondisi eksternal juga menentukan keberhasilan dari implementasi kebijakan, salah satunya kondisi sosial masyarakat yaitu tanggapan atau reaksi dari masyarakat setempat. Kondisi sosial dalam hal pelaksanaan program DAK Sanitasi di Desa Randuputih sangat kondusif dan mendapat respons baik oleh masyarakat. Masyarakat menerima adanya program DAK Sanitasi ini.

Kondisi sosial yang meliputi reaksi masyarakat menjadi salah satu hal yang penting dalam implementasi kebijakan, hal tersebut sesuai dengan pendapat menurut Van Meter dan Van Horn yang mengatakan bahwa menjelaskan faktor lain yang perlu diperhatikan dalam proses implementasi kebijakan yaitu kondisi sosial. Apabila ada penolakan dari masyarakat, kemungkinan proses implementasi sebuah kebijakan tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

### **b. Kondisi Ekonomi**

Kondisi ekonomi turut menciptakan keberhasilan atau kegagalan dari sebuah implementasi kebijakan. Kondisi ekonomi juga digunakan sebagai penjunjang dalam proses implementasi kebijakan berlangsung.



Dalam implementasi program DAK Sanitasi di Desa Randuputih menjelaskan bahwa kondisi ekonomi masyarakat tidak terlalu berpengaruh dalam pembangunan jamban. Seluruh proses pembangunan jamban dibiayai oleh dana DAK dari pemerintah pusat. Adanya dana swadaya dari masyarakat tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Kondisi ekonomi menjadi salah satu faktor keberhasilan atau kegagalan dari sebuah implementasi. Hal tersebut sesuai dengan pendapat menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2020) yang menjelaskan bahwa menjelaskan lingkungan eksternal juga mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan salah satunya kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi yang memadai dapat membantu keberhasilan dari sebuah implementasi kebijakan.

### **c. Kondisi Politik**

Lingkungan politik turut menciptakan keberhasilan dalam implementasi kebijakan. Adanya dukungan dari elit politik juga mempengaruhi adanya suatu kebijakan. Dalam implementasi program DAK Sanitasi dijelaskan bahwa tidak ada keterlibatan atau dukungan dari elit politik, sehingga tidak ada intervensi politik dari kelompok politik manapun. Pembangunan jamban sebagai implementasi program DAK Sanitasi di Desa Randuputih merupakan salah satu bentuk bantuan sosial bagi masyarakat

yang bertujuan untuk meningkatkan akses sanitasi layak di masyarakat.

Meskipun implementasi program DAK Sanitasi tidak mendapat dukungan atau keterlibatan elit politik, pelaksanaan program DAK Sanitasi tetap berjalan kondusif. Hal ini bertolak belakang dengan pendapat Van Meter dan Van Horn Van yang menjelaskan lingkungan eksternal mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan sebuah kebijakan publik, salah satunya lingkungan politik. Adanya dukungan elit politik juga dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan.